



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA BEKASI 2005 -2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Kota Bekasi
2013

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mekanisme perencanaan nasional dan daerah mengalami penyesuaian dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan mekanisme perencanaan pembangunan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kedua undang-undang dimaksud telah mengatur penyusunan 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan yang penting bagi daerah, yakni : Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD.

Sejalan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang sudah direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, maka diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025. Penyusunan dan implementasi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bekasi merupakan kegiatan yang menuntut partisipasi, komitmen, dan sinergi yang tinggi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan

masyarakat Kota Bekasi untuk memelihara keberlanjutan arah dan cita-cita pembangunan Kota Bekasi, yang lahir berlandaskan **jiwa dan semangat patriotik** yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Pemilihan Walikota secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Walikota dan calon Wakil Walikota untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka visi, misi, dan program pembangunan dimaksud akan menjadi materi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota ke masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota berikutnya. Dalam hal ini, keberadaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi Tahun 2005-2025 diharapkan dapat menjadi sumber **rujukan** bagi gagasan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan sebagai **referensi** bagi rumusan program untuk memelihara kesinambungan pembangunan.

Demikian pula diharapkan dokumen perencanaan jangka panjang ini dilandasi semangat membangun yang **sinergi** antara Pemerintah Kota Bekasi dengan kabupaten/kota lain di sekitarnya dan Provinsi DKI Jakarta, juga dilandasi **komitmen hierarkis** untuk merujuk arah pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Barat dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian desentralisasi dan penguatan otonomi daerah di Kota Bekasi masih tetap memelihara keterpaduan dan keserasian dengan pembangunan daerah lain di sekitarnya, untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil RPJP Kota Bekasi adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu:

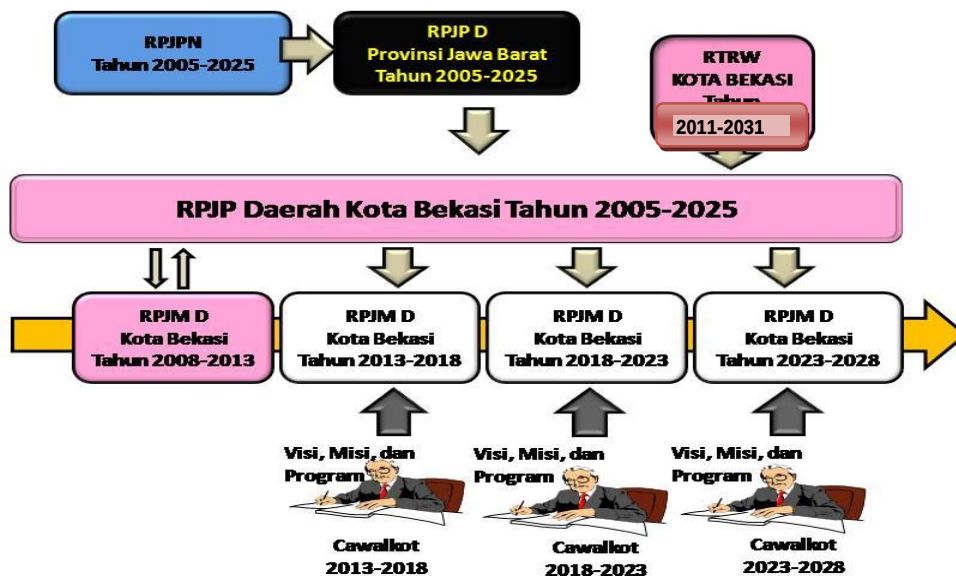
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031.

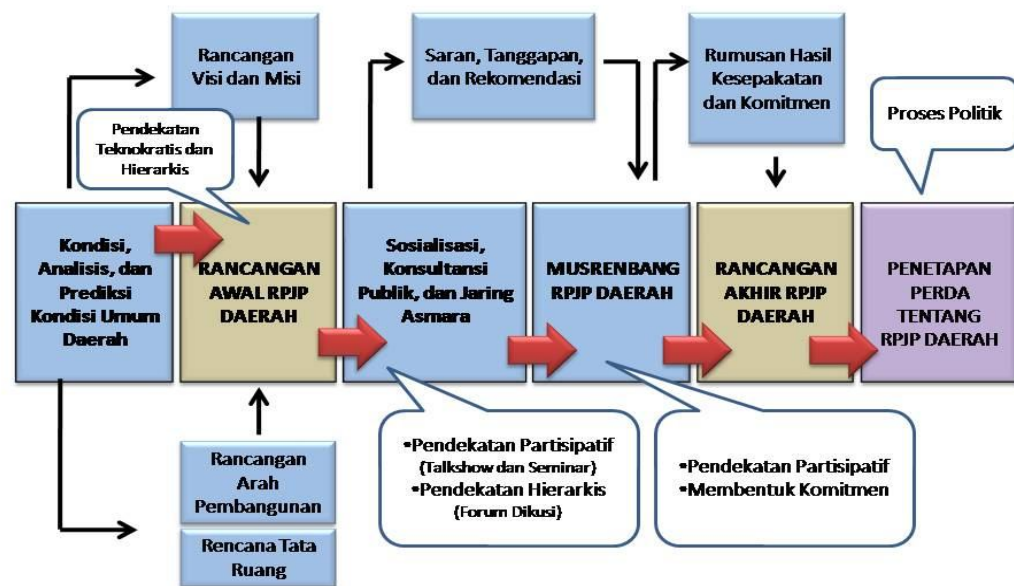
1.3. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada gambar berikut ini disajikan diagram hubungan RPJP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 yang mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi, dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi menjadi sumber **rujukan** bagi gagasan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan sebagai **referensi** bagi rumusan program untuk memelihara kesinambungan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah.



Gambar 1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

- 1) Pada gambar selanjutnya disajikan diagram mekanisme penyusunan RPJP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan penyusunan dan penetapan RPJP Daerah menempuh 4 (empat) proses pendekatan, yakni : teknokratis, hierarkis, partisipatif, dan politik



Gambar 2. Mekanisme Penyusunan RPJP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005–2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Bab III Analisis Isu – Isu Strategis

Bab IV Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Kota Bekasi, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Bekasi periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, ditetapkan dengan **maksud** memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Kota Bekasi (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan Kota Bekasi sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun **tujuan** penyusunan RPJP Daerah Kota Bekasi adalah :

- a. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang disepakati bersama, sebagai **pedoman** penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja RKPD dalam kurun waktu Tahun 2005 – 2025;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang **sinergis dan terpadu** antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Bekasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km², dengan Batas wilayah Kota Bekasi adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kab. Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan.

B. Topografi

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar, dengan kemiringan antara 0–2 %. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Pondok Gede. Sedangkan ketinggian antara 25–100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, Jatiasih.

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan pada beberapa daerah sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering merupakan langganan genangan, yaitu di Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojongmenteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya),

Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kota Baru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

C. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh pleistocene volcanik facies. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasi bagian utara. Sedangkan struktur *miocene sedimentary facies* terdapat di bagian timur wilayah Kota Bekasi sepanjang perbatasan dengan DKI Jakarta. Kondisi di wilayah selatan Kota Bekasi, tepatnya di daerah Jatisampurnaterdapat sumur gas. Sumur gas tersebut adalah Sumur JNG-A (106°55'8,687" BT; 06°20'54,051"LS) dan Sumur JNG-B (106°55'21,155" BT; 06°21'10,498"LS).

Keadaan tanah dapat membantu di dalam menentukan wilayah yang cocok untuk permukiman dengan mempertimbangkan aspek fisik yang meliputi kedalaman efektif, tekstur tanah, dan jenis tanah. Dengan kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 cm, jenis tanah latosol dan aluvial,serta tekstur tanah didominasi sedang halus. Komposisi perbandingan berdasarkan luasnya antara lain: tekstur halus seluas 17.260 ha (82%), tekstur sedang seluas 3.368 ha (16%)dan tekstur kasar seluas 421 ha (2%).

Sedangkan berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Halim Perdana Kusuma Tahun 2010 keadaan iklim di Kota Bekasi cenderung panas dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu 519,1 mm Sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 83,6 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 2. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara 24,3 – 34,4°C. Kondisi temperatur yang tinggi tersebut mengakibatkan kondisi lingkungan dan ruangan sangat panas. Total curah hujan bulanan tahun 2010 rata-rata mencapai sekitar 2.438 mm rerata kecepatan angin 8,37 km/jam (min 5,4 km/jam dan maks 13,7 km/jam), rerata kelembaban udara sekitar 82 % (min 68,9% dan maks 91,2%).

D. Rencana Struktur Wilayah Pengembangan

Sejalan dengan konsep struktur pelayanan yang direncanakan yaitu konsep gabungan “hirarki pusat” dengan “pusat kegiatan” (spesialisasi), maka Kota Bekasi dibagi ke dalam 5 Wilayah Pengembangan (WP) dengan masing-masing WP memiliki pusat atau sub pusat pelayanan. Pembagian WP ini dasarkan kepada kedekatan wilayah dan kemudahan aksesibilitas pencapaian pusat pelayanan bukan kepada batas administrasi kecamatan.

Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan yang meliputi kawasan Jalan Sudirman - Juanda - Cut Meutia - Ahmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi.

Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) meliputi :

- a. SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;
- b. SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat perdagangan;
- c. SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan;
- d. SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat industri dan jasa

pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPPAS DKI Bantargebang), dengan penyediaan pembangunan “buffer zone” yang dapat berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan lain-lain.

Penetapan Kawasan Strategis Kota

Penetapan Kawasan Strategis Kota dilaksanakan dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Jabodetabek – Punjur. Kawasan Strategis Kota (KSK) meliputi :

- KSK Pusat kota , dengan sudut kepentingan ekonomi skala kota dan regional
- KSK Mustikajaya / Bantargebang , dengan sudut pandang kepentingan ekonomi berbasis industri teknologi tinggi
- KSK Jatisampurna , dengan sudut pandang kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam dan teknologi tinggi.

E.RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG

Rencana pola pemanfaatan ruang Kota Bekasi dibedakan menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya .

1. Kawasan Lindung

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Untuk itu, terdapat beberapa kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Bekasi, yaitu:

- a. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung
- b. Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bekasi tahun 2011-2031, kawasan lindung Kota Bekasi adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rencana Kawasan Lindung Kota Bekasi sesuai RTRW Kota Bekasi
tahun 2011-2031

Kawasan Lindung		Lokasi
Kawasan perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Kali Cikeas
		Kali Cileungsi
		Kali Bekasi
		Kali Sunter
		Kali Cakung
		Bantaran Sungai Cikiwul
	Daerah Sekitar Situ	Situ Rawalumbu
		Situ Rawagede
		Situ Rawa Pulo
	Tampungan Air dan Pengendali Banjir	Kawasan Karang Kitri
		Kawasan Harapan Baru Regensi
		Kawasan Taman Permata Cikunir
		Situ Uwong
		Kawasan Puri Gading
		Bendung Cikeas
		Kawasan Rawa Pulo
		Kelurahan Pengasinan
		Kawasan Rawa Pasung
		Kawasan Rawa Lele
		Jati Bening 2
		Situ Jati Bening
		Kawasan Kompleks Kodam Jaya
		Kawasan Bumi Bekasi 3
		Situ Rawalumbu
		Saluran Rawalumbu Hulu
		PHP Narogong
		Rawa Gede
		Cipendawa
		Desa Jatimulya
Ruang Terbuka Hijau Kota	Kawasan Penyangga	
	Hutan Kota	

Kawasan Lindung	Lokasi
Taman Kota	
Taman Lingkungan	
Taman Rekreasi	
Tempat Pemakaman Umum	
Lapangan Olahraga/Lapangan Terbuka Hijau	
Sempadan Jalan	
Sempadan Sungai	
Pulau Jalan	
Sempadan Instalasi Bahaya	
Sempadan Kereta Api	
Taman Halaman Gedung	
Taman Persil	
Lahan Pekarangan	

Sumber: Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi

2. Kawasan Budidaya

Kota Bekasi didominasi oleh penggunaan lahan permukiman baik yang terstruktur maupun permukiman yang dibangun oleh individu masyarakat. Perkembangan kegiatan permukiman terstruktur beberapa tahun terakhir mengakibatkan bangkitan kegiatan pendukung permukiman berupa perdagangan, jasa dan kebutuhan fasilitas masyarakatnya. Disisi lain perkembangan Kota Jakarta menyebabkan Kota Bekasi yang berfungsi sebagai penyangga Kota Jakarta mendapat limpahan kegiatan baik berupa industri, perdagangan dan jasa serta permukiman itu sendiri. Penggunaan lahan di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Klasifikasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Kawasan di Kota Bekasi
Tahun 2010

Rincian Penggunaan Lahan	Luas (ha)	%
Jaringan Prasarana	1.584	7,5%
Perkampungan	8.841	42,0%
Perumahan	4.650	22,1%
Komersial	326	1,5%
Industri	402	1,9%
Sarana Pelayanan Umum	166	0,8%
RTH/Pekarangan/Pertanian	5.080	24,1%
Total	21.049	100%

Sumber : Dinas Tata Kota Kota Bekasi

Tabel 2.3

Klasifikasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Kawasan dan Wilayah di
Kota Bekasi Tahun 2010

Penggunaan Lahan existing tahun 2010	Pusat Kota	Bekasi Utara	Pondok Gede	Mustika Jaya	Jati sampurna	Bekasi
Jaringan Prasana	643	363	330	211	36	1.584
Perkampungan	2.997	1.760	1.746	909	1.429	8.841
Perumahan	1.644	1.010	1.004	501	492	4.650
Komersial	108	54	66	36	63	326
Industri	43	152	22	171	13	402
Sarana Pelayanan Umum	65	22	40	17	22	166
RTH/Pekarangan/Pertanian	801	76	470	2.331	1.403	5.080
Total	6.301	3.436	3.677	4.177	3.458	21.049

Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Bekasi

Tabel 2. 4. Rincian Rencana Pola Ruang Kota Bekasi

Rincian Rencana Pola Ruang	Pusat Kota		Bekasi Utara		Pondok Gede		Mustika Jaya		Jatisampurna	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
RTH	555,19	8,8%	202,37	5,9%	305,16	8,3%	393,81	9,4%	409,11	11,8%
Tampungan Air	0,46	0,0%	12,33	0,4%	3,06	0,1%	11,29	0,3%	0,89	0,0%
Jaringan Prasarana	725,30	11,5%	390,91	11,4%	391,46	10,6%	328,95	7,9%	267,31	7,7%
Perumahan	3.767,23	59,8%	1.796,89	52,3%	2.359,62	64,2%	2.201,41	52,7%	2.268,89	65,6%
Komersial	876,28	13,9%	594,94	17,3%	453,39	12,3%	362,68	8,7%	410,06	11,9%
Sarana Pelayanan Umum	197,35	3,1%	61,59	1,8%	93,13	2,5%	57,97	1,4%	64,68	1,9%
Pemerintahan	58,02	0,9%	2,95	0,1%	2,09	0,1%	4,67	0,1%	2,04	0,1%
Pertahanan dan Keamanan		0,0%		0,0%	35,49	1,0%	0,58	0,0%	0,41	0,0%
Industri	121,16	1,9%	374,01	10,9%	34,01	0,9%	665,64	15,9%	30,22	0,9%
TPA		0,0%		0,0%		0,0%	150,00	3,6%		0,0%
Pertambangan		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	3,97	0,1%
Total	6.301,00	100,0%	3.436,00	100,0%	3.677,41	100,0%	4.177,00	100,0%	3.457,58	100,0%

Sumber: Dinas Tata Kota, Kota Bekasi

3. Daerah titik banjir dan genangan

Sebagai wilayah yang dilalui oleh 12 aliran sungai, Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap luapan air sungai di musim penghujan dan dampak dari meningkatnya debit air pada induk sungai-sungai tersebut di daerah hulu. Tabel 2.5 menunjukkan luasan daerah terkena banjir di Kota Bekasi tahun 2013. Dari Tabel 2.5 tersebut terlihat bahwa sekitar 10% wilayah Kota Bekasi terkena dampak banjir besar yang terjadi di wilayah Jabotabek dan sekitarnya.

Tabel 2.5
Data Luasan Bencana Banjir di Kota Bekasi Tahun 2013

KECAMATAN	Luas / Area		Kelurahan	Wilayah Banjir tahun 2013	
	Ha	%		%	Ha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pondokgede	1.629	7,74	5	10%	160
Jatisampurna	1.449	6,88	5	0	0
Pondok Melati	1.857	8,82	4	10%	190
Jatiasih	2.200	10,45	6	15%	330
Bantargebang	1.704	8,1	4	0	0
Mustika Jaya	2.473	11,75	4	0	0
Bekasi Timur	1.349	6,41	4	20%	270
Rawalumbu	1.567	7,44	4	15%	240
Bekasi Selatan	1.496	7,11	5	20%	300
Bekasi Barat	1.889	8,97	5	15%	280
Medansatria	1.471	6,99	4	10%	150
Bekasi Utara	1.965	9,33	6	10%	200
Kota Bekasi	21.049	100,00	56	10,072%	2.120

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013.

Selanjutnya Tabel 2.6 memperlihatkan ketinggian dan lama genangan yang terjadi selama bencana banjir yang terjadi pada tahun 2013. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.6, Kecamatan Jatiasih merupakan wilayah dengan genangan paling luas yaitu 330 Ha dengan rata-rata lama genangan adalah 26,5 Jam dan rata-rata ketinggian genangan 148,75 Cm. Sedangkan rata-rata ketinggian genangan yang terjadi di Kota Bekasi adalah 90,81 Cm dengan rata-rata lama genangan adalah 18,24 Jam.

Tabel 2.6
Data Jumlah Sebaran Lokasi Banjir Tahun 2013

NO.	LOKASI BANJIR	KELURAHAN	Ketinggian Genangan (Cm)	Lama Genangan (Jam)	Luas Genangan (Ha)
A.	Kecamatan Jatiasih				330
1	Perumahan Villa Jatirasa	Jatirasa	120	24	
2	Perumahan Pondok Gede Permai	Jatirasa	250	38	
3	Perumahan Kemang IFI	Jatirasa	200	24	
4	Perumahan PPA Jatiasih	Jatirasa	150	24	
5	Perumahan Pondok Mitra Lestari	Jatirasa	100	24	
6	Perumahan Graha Indah	Jatimekar	50	24	
7	Komplek Nasio	Jatimekar	70	24	
8	IKIP	Jatikramat	250	30	
			148,75	26,5	
B.	Kecamatan Pondok Gede				160
1	Perumahan Antilop	Jaticempaka	100	24	
2	Perumahan Jatibening Baru II	Jatibening Baru	150	24	
3	Perum jatibening Baru (Komplek AL)	Jatibening	100	20	
4	Perumahan Duta Indah	Jatimakmur	60	12	
5	Perumahan Sari Gaperi	Jatimakmur	70	12	

6	Perumahan Cahaya Kemang (CKP)	Jatimakmur	100	24	
7	Perumahan Villa Bougenvile	Jatibening Baru	40	12	
			88.57	18.28	
C.	Kecamatan Pondok Melati				190
1	Perumahan Candra Lama	Jatirahayu	50	12	
2	Perumahan Candra Baru	Jatirahayu	50	12	
			50	12	
D.	Kecamatan Bekasi Selatan				300
1	Perumahan Jaka Kencana	Jakasetia	60	12	
2	Pangkalan Bambu – GIANT	Marga Jaya	250	48	
3	Perumahan Galaxy	Jakamulya	70	8	
4	Perumnas II	Kayuringin	40	10	
5	Perumahan BSK	Kayuringin	60	24	
6	Perumahan Depnaker	Jakasetia	150	36	
			105	23	
E.	Kecamatan Bekasi Barat				280
1	Mas Naga	Bintara	70	12	
2	Jatiluhur	Jakasampurna	80	12	
3	Perumahan Harapan Baru II	Kotabaru	90	12	
4	Perumahan Persada Kemala	Jakasampurna	60	12	
			75	12	
F.	Kecamatan Rawalumbu				240
1	Perumahan	Bojong	50	10	

	Kemang Pratama	Rawalumbu			
2	Rawalumbu Utara	Pengasinan	100	24	
3	Narogong	Pengasinan	70	18	
4	Perumahan PHP II	Pengasinan	120	24	
			85	19	
G.	Kecamatan Bekasi Timur				270
1	Perumnas III	Aren Jaya	70	24	
2	Perumahan Durenjaya	Duren Jaya	80	24	
3	Perumahan Danita	Bekasi Jaya	80	24	
4	Perumahan wisma Jaya	Aren Jaya	50	12	
5	Kartini	Margahayu	100	30	
6	Perumahan Karang Kitri	Margahayu	100	30	
7	Margahayu	Margahayu	100	30	
8	Unisma	Margahayu	100	8	
			85	22.75	
H.	Kecamatan Bekasi Utara				200
1	Kelurahan Perwira/ Kec. Bekasi Utara	Perwira	40	20	
2	Kelurahan Teluk Pucung/ Kec. Bekasi Utara	Teluk Pucung	250	24	
3	Kelurahan Harapan Mulya/ Kec. Bekasi Utara	Harapan Mulya	40	12	
			110	18.67	
I.	Kecamatan Medan Satria				150
1	Rawa Pasung	Kalibaru	80	12	
2	Perumahan	Pejuang	70	12	

2011, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.447.930 jiwa yang berarti hamper 2 kali lipat jumlah penduduk Kota Bekasi sejak kota ini berdiri. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Bekasi cenderung seimbang, dimana jumlah penduduk laki-laki di Kota Bekasi adalah sebanyak 1.250.435 jiwa atau 51,08% sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 1.197.495 jiwa atau 48,92%.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, kecamatan Bekasi Timur merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 19.020 jiwa/km² dan kecamatan Bantar Gebang adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah dengan tingkat kepadatan sebesar 5.959 jiwa/km².

Tabel. 2.7
Perkiraan Distribusi Penduduk Kota Bekasi 2005-2025

No	Kecamatan	Eksisting	Rata2	Perkiraan			
		2005	%	2010	2015	2020	2025
1	Pondok Gede	196,318	4.79	248,106	313,554	396,268	500,802
2	Jati Sampurna	69,759	1.46	74,998	80,630	86,686	93,196
3	Jati Asih	168,210	2.02	185,877	205,400	226,974	250,813
4	Bantar Gebang	72,114	4.9	91,585	116,312	147,717	187,600
5	Bekasi Timur	243,552	3.89	294,784	356,792	431,844	522,684
6	Rawa Lumbu	185,640	6.92	259,444	362,589	506,740	708,201
7	Bekasi Selatan	185,776	2.97	215,074	248,992	288,259	333,719
8	Bekasi Barat	259,308	3.35	305,729	360,461	424,991	501,072
9	Medan Satria	147,030	3.92	178,183	215,938	261,691	317,140
10	Bekasi Utara	274,968	5.02	351,215	448,604	572,999	731,888
11	Mustika Jaya	97,768	4.9	124,165	157,690	200,266	254,337
12	Pondok Melati	101,456	4.79	128,220	162,043	204,789	258,811
Kota Bekasi		2,001,899	3.78	2,409,778	2,900,760	3,491,778	4,203,213

Tabel 2.8
Komposisi Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan
Hasil Sensus Penduduk tahun 2011

Kecamatan	Penduduk		Jumlah	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan			
Pondok Gede	152.640	146.097	298.737	16,29	18.338
Jatisampurna	52.592	49.723	102.315	14,49	7.061
Pondok Melati	69.333	66.510	135.843	18,57	7.315
Jatiasih	109.987	104.888	214.875	22,00	9.767
Bantargebang	52.452	40.090	101.542	17,04	5.959
Mustika Jaya	76.878	73.708	150.586	24,73	6.089
Bekasi Timur	131.183	125.409	256.592	13,49	19.020
Rawalumbu	96.707	94.761	191.468	15,67	12.218
Bekasi Selatan	112.618	107.865	220.483	14,96	14.738
Bekasi Barat	145.796	140.339	286.135	18,89	15.147
Medan Satria	80.483	76.831	157.314	14,71	10.694
Bekasi Utara	169.766	162.274	332.040	19,65	16.897
JUMLAH	1.250.435	1.197.495	2.447.930	210,49	11.629

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2012.

Di samping itu, bila diperhatikan lebih cermat, terjadi pemusatan kepadatan penduduk pada beberapa wilayah Kota Bekasi, lima kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Utara dihuni oleh 57% populasi penduduk Kota Bekasi, sedangkan lima kecamatan tersebut memiliki luas wilayah 40% dari luas wilayah Kota Bekasi secara keseluruhan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel. 2.10. Perkiraan PDRB Kota Bekasi 2010-2025
(Jutaan Rupiah, harga konstan 2000)

No	Lapangan Usaha	PDRB 2005	Laju Rata2	Perkiraan				Proporsi %
				2010	2015	2020	2025	
1	Pertanian	126,235	2.54	143,102	162,223	183,899	208,471	0.6
2	Pertambangan & Penggalian							
3	Industri Pengolahan	5,478,623	5.8	7,262,728	9,627,823	12,763,108	16,919,393	48.9
4	Listrik, Gas, Air Bersih	398,020	5.76	526,638	696,818	921,991	1,219,927	3.5
5	Bangunan	407,545	5.58	534,566	701,177	919,716	1,206,368	3.5
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	3,239,089	5.76	4,285,782	5,670,708	7,503,165	9,927,770	28.7
7	Pengangkutan & Komunikasi	927,607	7.05	1,304,059	1,833,288	2,577,295	3,623,243	10.5
8	Kuangan, Persewaan, Jasa	403,359	5.47	526,375	686,908	896,401	1,169,785	3.4
9	Jasa-jasa	760,008	6.1	1,021,917	1,374,083	1,847,610	2,484,321	7.2
	Jumlah*			15,605,167	20,755,044	27,613,184	36,759,277	102.2
	Bekasi**	11,739,946	5.76	15,533,643	20,553,251	27,194,917	35,982,799	

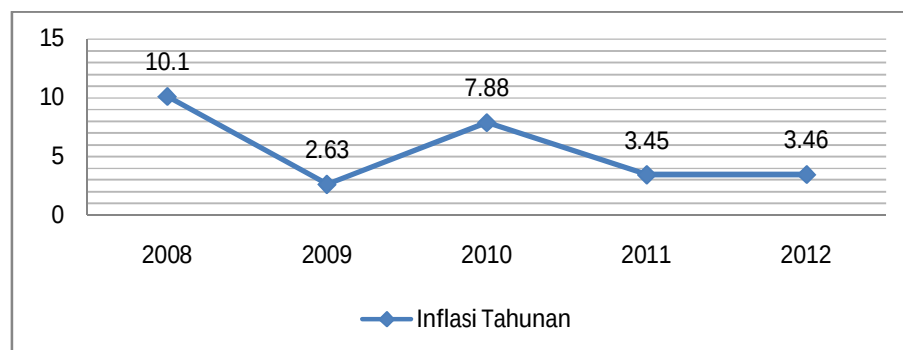
	Penduduk			2,307,132	2,659,481	3,066,291	3,534,618	
	PDRB / Kapita (Rp.)			6,763,881	7,804,171	9,005,402	10,399,788	
	PDRB / Kapita (US\$)***			752	867	1,001	1,156	

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH).

Laju inflasi Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Hanya saja selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2011 dan tahun 2013, laju inflasi Kota Bekasi menunjukkan perkembangan yang relatif stabil pada laju inflasi sebesar 3,45% dan 3,56%.

Grafik 2.1
Laju Inflasi Kota Bekasi
Tahun 2008-2012



c. PDRB per Kapita

Pendapatan per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara (*daerah*). Pendapatan per Kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara (*atau PDRB bagi daerah*) dengan jumlah penduduk Negara (*daerah*) tersebut. Pendapatan per Kapita juga merefleksikan PDB per Kapita. Jadi untuk melakukan perhitungan PDRB Per Kapita adalah dengan membagi nilai total PDRB (*ADHB atau ADHK*) terhadap Jumlah Penduduk yang ada pada periode perhitungan PDRB Per Kapita tersebut.

Dengan menggunakan perhitungan PDRB per Kapita maka dapat diperkirakan pendapatan rata-rata penduduk di Kota Bekasi setiap tahunnya, walaupun dalam perhitungan PDRB per Kapita tidak diperhatikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011, PDRB Kota Bekasi selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari sisi PDRB ADHB maupun dari sisi ADHK.

**Tabel.2.11.Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi
Tahun 2008-2011**

Tahun	PDRB per Kapita (ADHB)	PDRB per Kapita (ADHK)
2008	13.188.518,41	6.272.523,14
2009	13.569.796,76	6.304.151,87
2010	15.280.957,86	6.628.246,51
2011	16.727.244,18	6.839.485,59

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011

B. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (bisa juga digunakan untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara (daerah) adalah negara (daerah) maju, negara (daerah) berkembang atau negara (daerah) terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Selama lima tahun ke belakang, Kota Bekasi memiliki capaian IPM yang sangat baik dan selalu berada di atas rata-rata nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun 2008, IPM Kota Bekasi adalah 75,73 dan pada tahun 2011 telah meningkat menjadi 76,68.

Tabel 2.12

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2008-2011

Wilayah	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Kota Bekasi	75,73	76,10	76,36	76,68
Jawa Barat	71,12	71,64	72,29	72,73
Indonesia	71,17	71,76	72,27	72,27

Sumber: BPS RI, 2011.

a. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dalam pengukuran IPM terdiri dari dua indikator utama, yaitu angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah penduduk dewasa.

- Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah porsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf Kota Bekasi pada tahun 2008 adalah sebesar 98,46% dan angka ini terus meningkat dalam tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2011 lalu angka melek huruf Kota Bekasi mencapai 98,56%.

**Tabel. 2.13 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bekasi
Tahun 2008-2011**

Tahun	Angka Melek Huruf
2008	98,46
2009	98,49
2010	98,51
2011	98,56

Sumber: BPS Kota Bekasi

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 berada di atas angka 10 tahun

dimana pada tahun 2008 angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi adalah 10,19 tahun, kemudian pada tahun 2009 sebesar 10,52 tahun, tahun 2010 adalah 10,53 tahun, dan pada tahun 2011 adalah 10,58 tahun. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi tahun 2008 hingga tahun 2012 disajikan pada Tabel 2.14

**Tabel 2.14 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2008-2011**

Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2008	10,19
2009	10,52
2010	10,53
2011	10,58

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011

b. Indeks Kesehatan

- Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada

suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

Angka harapan hidup Kota Bekasi selama lima tahun ke belakang menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif, dimana pada tahun 2008 angka harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 69,52 tahun sedangkan pada tahun 2011 angka harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 69,70% dimana angka ini selalu lebih tinggi daripada angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

Tabel 2.15
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bekasi, Jawa Barat dan
Indonesia Tahun 2008-2012

Wilayah	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Kota Bekasi	69,52	69,58	69,64	69,70	N/A
Jawa Barat	67,80	68,00	68,20	68,40	N/A
Indonesia	68,08	68,47	68,89	69,32	N/A

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011; Bank Dunia 2012.

c. Pengeluaran per Kapita disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan atau lebih sering disebut dengan indeks standar hidup layak atau indeks kemampuan daya beli dihitung berdasarkan data turunan dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk setiap tahun dengan penyesuaian terhadap kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power parity/ppp*). Indeks standar hidup layak menggambarkan tingkat kekuatan penduduk dalam mengakses kebutuhan hidupnya di suatu wilayah sebagai proksi dari kesejahteraan penduduk dalam perhitungan IPM.

Pengeluaran per kapita Kota Bekasi dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang positif, dimana pada tahun 2008 pengeluaran per kapita penduduk Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 639,93 dan meningkat menjadi Rp. 646,92 pada tahun 2011.

Tabel 2.16

Pengeluaran per Kapita di Sesuaikan Masyarakat Bekasi

Tahun 2008-2012

Tahun	Konsumsi Per Kapita (Rp)
2008	639,93
2009	641,20
2010	643,92
2011	646,92
2012	N/A

Sumber: BPS Kota Bekasi 2011.

2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak,

program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Tabel 2.17
Angka Kematian Ibu

Uraian	2009	2010	2011
Kematian Ibu Hamil	7	4	6
Kematian Ibu Bersalin	7	10	8
Kematian Ibu Nifas	6	6	4
Jumlah	20	20	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2012

Tabel 2.18 Penyebab Kematian Ibu

Uraian	2009	2010	2011
Pendarahan	2	8	3
Emboli Air Ketuban	-	3	1
Eklampsia	7	2	3
Hipertensi Dalam Kehamilan	-	1	2
Asma	1	1	-
Jantung	1	1	2
Sesak	-	1	-
Bronkopneumia	-	1	-
Lainnya	9	2	7
Jumlah	20	20	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2012.

Tabel 2.19 Banyaknya Kelahiran dan Kematian Bayi di Kota Bekasi

Uraian	2009	2010	2011
Jumlah Kelahiran Hidup	39,540	41,516	45,329
Jumlah Kematian Bayi	43	65	42
Jumlah	39,583	41,581	45,371
Kematin bayi / 1000 kelahiran	1.08	1.56	0.93

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2012

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis dari unsur unsur laju pertambahan dan unsur unsur yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Bekasi, pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi adalah sebesar 3,77%, sedangkan pertumbuhan penduduk paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat terjadi pada tahun 2008 dimana pada tahun tersebut pertumbuhan penduduk Kota Bekasi adalah sebesar 4,43% dari tahun sebelumnya. Tabel 2.23 menampilkan laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi tahun 2008-2012.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
2008	2.238.717	4,43%
2009	2.319.518	3,61%
2010	2.334.871	0.66%
2011	2.422.922	3,77%
2012	N/A	N/A

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2012.

4. Ketenagakerjaan

a. Rasio Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang

sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Tabel 2.21 menunjukkan data penduduk Kota Bekasi berdasarkan status bekerja atau tidaknya. Dalam hal ini penduduk Kota Bekasi dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Dimana penduduk angkatan kerja dibagi menjadi penduduk bekerja dan penduduk mencari kerja (tidak bekerja). Pada kategori ini, 89,49% dari penduduk angkatan kerja di Kota Bekasi pada tahun 2011 atau 990,630 jiwa adalah termasuk ke dalam kelompok penduduk bekerja, dan 10,51% dari penduduk angkatan kerja atau 116,290 jiwa penduduk Kota Bekasi pada tahun 2011 termasuk ke dalam kelompok penduduk mencari kerja (tidak bekerja).

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Bekerja Kota Bekasi Tahun 2011

Kegiatan	Penduduk	%
1. Angkatan Kerja	1.106.920	63,79
a. Bekerja	990.630	89,49
b. Mencari Kerja	116,290	10,51
2. Bukan Angkatan Kerja	628.416	36,21
a. Sekolah	155,087	24,68
b. Mengurus Rumah Tangga	404,254	64,33
c. Lainnya	69,075	10,99
Jumlah	1,735,336	100

Sumber: Sakernas, data diolah, BPS Kota Bekasi

5. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tingkat kriminalitas di Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008-2011 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, walaupun demikian tren menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2008 tercatat terdapat 1921 tindak kriminalitas di Kota Bekasi, angka ini kemudian meningkat menjadi 2265 kasus pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 3616 kasus di tahun 2011.

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Kriminalitas di Kota Bekasi
Tahun 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pembunuhan	0	7	7	7	6
2.	Penganiayaan	108	160	204	189	210
3.	Penganiayaan Ringan	N/A	N/A	N/A	N/A	40
4.	Perampokan	24	66	67	43	354
5.	Pencurian	298	358	467	764	955
6.	Perkosaan	5	9	7	2	2
7.	Penipuan	448	400	484	462	559
8.	Penggelapan	212	188	272	198	223
9.	Peras Ancam	40	41	41	29	60
10.	Pengrusakan	52	32	50	36	41
11.	Penculikan	5	4	2	7	4
12.	Penyerobotan Tanah	41	20	14	31	21
13.	Pemalsuan Surat	48	38	35	45	45
14.	Narkotika	474	416	461	511	360
15.	Lain-lain	162	533	1508	1665	736
	Jumlah	1921	2265	3619	3989	3616

Sumber: Polres Metro Bekasi, 2012

2.3.Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.23
Jumlah Gedung Sekolah di Kota Bekasi
Tahun 2008-2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	638	638	638	627	N/A
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	190	207	201	209	N/A
2.3.	Rasio					

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2012.

Rasio Guru-Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.24 menunjukkan jumlah guru dan rasio guru-murid di Kota Bekasi pada tahun 2008-2011 dimana terlihat pada tingkat sekolah dasar, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 selalu terjadi peningkatan rasio guru-murid, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah guru yang signifikan terutama pada tahun 2011.

Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama, peningkatan rasio guru-murid terjadi pada selang waktu antara tahun 2008-2010 hingga mencapai rasio 6,49%, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan rasio guru murid menjadi 4,84%, hal ini lebih disebabkan oleh penurunan jumlah guru yang signifikan pada tahun 2011.

Tabel 2.24
Jumlah Guru di Kota Bekasi
Tahun 2008-2012

NO	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	7023	7257	7636	10595	N/A
1.2.	Jumlah Murid	220381	231331	233608	240938	N/A
1.3.	Rasio	3,16%	3,13%	3,27%	4,39%	N/A
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	3135	4120	5217	3960	N/A
2.2.	Jumlah Murid	76376	77054	80385	81754	N/A
2.3.	Rasio	4,10%	5,34%	6,49%	4,84%	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi

2. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Kesehatan

Ketersedian prasarana dan sarana kesehatan mengindikasikan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit menggambarkan daya tampung sarana dan prasarana kesehatan terhadap pasien. Sedangkan jumlah tenaga medis menggambarkan tingkat keterlayanan layanan medis di Kota Bekasi.

Jumlah puskesmas di Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 cenderung tetap. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 tidak terjadi penambahan jumlah puskesmas di Kota Bekasi, sedangkan puskesmas pembantu mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2009 menjadi berjumlah 28 unit yang sebelumnya berjumlah 25 unit pada tahun 2008. Untuk rumah sakit, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 setidaknya telah bertambah 10 unit rumah sakit di Kota Bekasi. Sedangkan tenaga medis di Kota Bekasi

meningkat cukup signifikan sejak tahun 2008 hingga tahun 2011. Tercatat pada tahun 2008 di Kota Bekasi hanya terdapat 726 orang tenaga medis di Kota Bekasi, sedangkan pada tahun 2011 jumlah tenaga medis di Kota Bekasi telah meningkat menjadi berjumlah 4688 orang. Tabel 2.25 menunjukkan perkembangan jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bekasi sejak tahun 2008 hingga tahun 2011

Tabel 2.25

Jumlah Prasarana dan Sarana Kesehatan di Kota Bekasi
Tahun 2008-2012

NO	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Puskesmas	31	31	31	31	N/A
2.	Jumlah Pustu	25	28	28	28	N/A
3.	Jumlah Rumah Sakit	28	29	38	38	N/A
4.	Jumlah Tenaga Medis	726	777	4289	4688	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi

3. Permukiman

Secara umum perkembangan permukiman di Kota Bekasi mengarah pada terbentuknya kawasan-kawasan permukiman baru skala besar yang dikembangkan oleh swasta, terutama di Bantargebang dan Jatisampurna, dan di kawasan sebelah utara Kota Bekasi.

Adapun permukiman yang dibangun secara individu tersebar merata di semua kecamatan di Kota Bekasi. Permukiman di Bekasi bagian selatan merupakan

permukiman dengan kepadatan yang masih rendah. Permukiman kepadatan tinggi banyak ditemui Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur dan Rawalumbu. Sedangkan permukiman kepadatan sedang berkembang di Kecamatan Bekasi Utara, Medansatria, Jatisampurna, dan Jatiasih. Kemudian untuk permukiman dengan kepadatan rendah Berkembang di Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya serta sebagian Jatiasih.

Permukiman Teratur dan Tidak Teratur

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Sampai tahun 2010, luas permukiman layak huni (permukiman teratur) di Kota Bekasi mencapai 3.207,73 Ha. Sedangkan jumlah permukiman tidak teratur mencapai 4.744,88 Ha. di kota Bekasi

Tabel.2.26 Luasan Permukiman Teratur dan Tidak Teratur

No	Kecamatan	Luasan (hektar)					
		Permukiman Teratur Kepadatan Rendah	Permukiman Teratur Kepadatan Tinggi	Total Permukiman Teratur	Permukiman Tidak Teratur Kepadatan Rendah	Permukiman Tidak Teratur Kepadatan Tinggi	Total Permukiman Tidak Teratur
1	Bantar Gebang	21.34		21.34	419.75		419.75
2	Bekasi Barat		282.18	282.18		406.56	406.56
3	Bekasi Selatan	192.95	256.99	449.94	258.25	148.56	406.81
4	Bekasi Timur		345.84	345.84		356.49	356.49
5	Bekasi Utara	103.65	273.91	377.56	110.45	245.57	356.02
6	Jati Asih	285.08		285.08	482.35		482.35
7	Jati Sampurna	129.08		129.08	239.66		239.66
8	Medan Satria	4.53	296.78	301.31	101.37	161.57	262.94
9	Mustika Jaya	175.51		175.51	450.52		450.52
10	Pondok Gede		335.01	335.01		565.35	565.35
11	Pondok Melati	57.16	80.34	137.5	289.41	113.11	402.52
12	Rawa Lumbu	64.69	302.69	367.38	187.54	208.37	395.91
Total		1,033.99	2,173.74	3,207.73	2,539.30	2,205.58	4744.88

Pelayanan air minum di Kota Bekasi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari cakupan pelayanan eksisting tahun 2012 yang hanya berkisar 23 % dari jumlah total penduduk. Begitu pula dengan kemampuan pengembangan cakupan pelayanan sambungan langganan yang masih rendah, dimana setiap tahun hanya mampu mengembangkan kurang dari 1% jauh di bawah nilai

pertumbuhan jumlah penduduk yang sebesar 3%. Oleh karena itu setiap tahunnya semakin banyak penduduk Kota Bekasi yang belum memperoleh akses terhadap air minum yang sehat dan terjamin.

Penduduk di wilayah tengah dan utara telah menikmati pelayanan air minum yang berasal dari PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot. Sedangkan penduduk di wilayah barat dan selatan sebagian besar belum mendapatkan pelayanan air minum sehingga penduduk memenuhi kebutuhan air minum melalui penggunaan air tanah dangkal maupun air di dalam kemasan.

Rendahnya angka peningkatan cakupan pelayanan, juga dipengaruhi oleh rendahnya peningkatan kapasitas produksi dan distribusi. Kapasitas instalasi pengolahan air minum (IPA) yang ada masih jauh dibawah angka kebutuhan. Setiap tahunnya tidak terdapat peningkatan kapasitas IPA yang signifikan. Meskipun terdapat peningkatan kapasitas IPA, itu terdapat dalam jumlah kecil dan dilakukan bukan melalui pembangunan IPA baru melainkan optimalisasi atau *up rating* IPA eksisting.

Tabel 2.27 Cakupan Pelayanan PDAM Eksisting S.D Tahun 2011

INSTITUSI PENYEDIA LAYANAN AIR PERPIPAAN	JUMLAH PELANGGAN (UNIT)	JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI (JIWA)	CAKUPAN PELAYANAN (%)
PDAM Tirta Bhagasasi	85.000	340.000	16,96
PDAM Tirta Patriot	13.000	52.000	2,59
Bamus Pondok Hijau	425	1.700	0,08
Dev. Kemang Pratama	400	1.600	0,08
JUMLAH	98.825	395.300	19,71

Tabel 2.28. Kapasitas IPA Eksisting S.D Tahun 2011

NO	UNIT PELAYANAN	KAPASITAS TERPASANG (Liter/Detik)	KAPASITAS PRODUKSI (Liter/Detik)
PDAM TIRTA BHAGASASI			
1	Cabang Pondok Ungu	300	491
2	Cabang Rawa Tembaga	190	151
3	Cabang Kota	480	367
4	Cabang Rawa Lumbu	260	191
5	Cabang Pondok Gede	10	6
PDAM TIRTA PATRIOT		450	325
BAMUS PONDOK HIJAU		15	5
JUM LAH		1,705	1,536
IDLE CAPACITY		169	

**Tabel 2.29 Proyeksi Pengembangan Cakupan Pelayanan
s.d. Tahun 2025**

URAIAN	SATUAN	EKSISTING 2012	TARGET 2025	SELISIH	
				PER TAHUN	TOTAL
Jumlah Penduduk	Jiwa	2,447,930	3,178,071	182,535	730,141
Penduduk Terlayani Air Bersih	Jiwa	505	1,542	259	1,038
Jumlah Sambungan Langganan	Unit	101	308	52	208
Cakupan Pelayanan	%	22.40	45.85	5.86	23.45

Sumber : PDAM Th.2012

4. Pekerjaan Umum

Kondisi terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

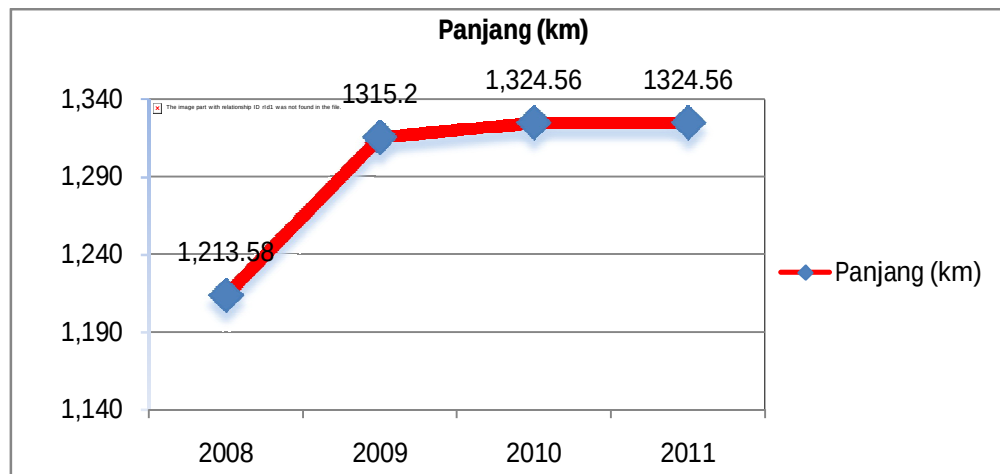
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jaringan jalan yang baik , memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan perekonomian suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat , sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam , sumber daya manusia dan

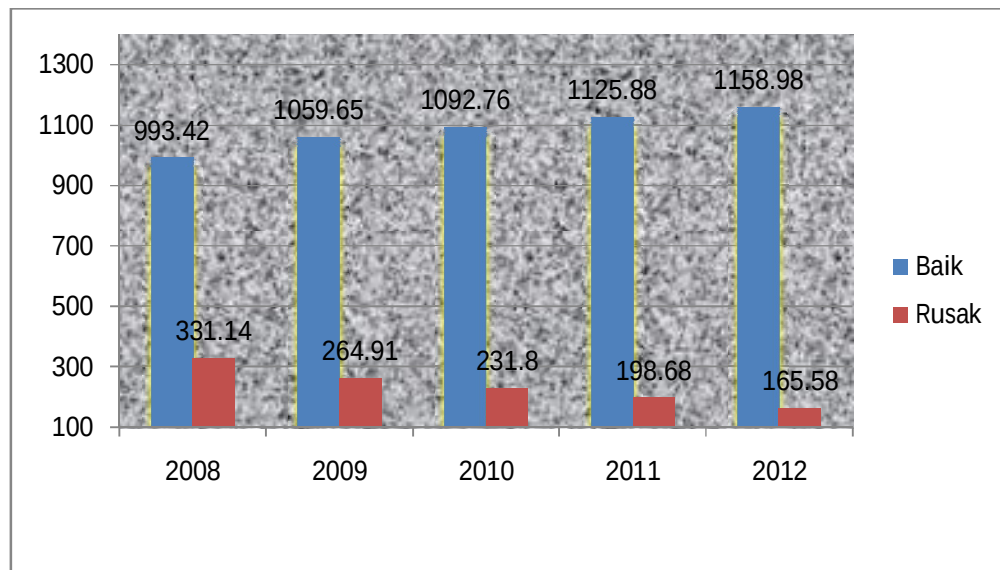
sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan . Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur –jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* (jaringan jalan yang menyempit) pada jaringan transportasi yang disebabkan pembangunan yang tidak memperhatikan

aspek tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak mampu lagi menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang , sedang rusak , rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan sebagai berikut :

Garfik 2.2. Panjang Jalan di Kota Bekasi 2008 – 2011



Grafik 2.4 Kondisi Jalan di Kota Bekasi Tahun 2008 – 2011



5. Penataan Ruang

Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Tabel 2.30. Rekapitulasi Kondisi Eksisting dan potensial RTH Kota Bekasi
Tahun 2012

No	Kecamatan di Daerah Studi	Luas (Ha)	Luas Eksisting (%)			Luas Potensial (%)		
			RTH Publik	RTH Privat	Total	RTH Publik	RTH Privat	Total
1	Bantar Gebang	2.036,40	3,2	4,2	7,4	17,7	5,9	23,6
2	Mustika Jaya	2.660,35	2,8	6,7	9,5	6,8	5,8	12,6
3	Rawa Lumbu	1.558,21	4,7	7,7	12,4	7,1	7,3	14,4
4	Bekasi Timur	1.316,40	4,5	7,2	11,7	5,7	9,6	15,3
5	Medan Satria	1.462,52	3,3	2,7	6,0	5,5	2,9	8,4
6	Bekasi Barat	1.423,40	4,1	6,2	10,3	6,5	7,8	14,3
7	Bekasi Selatan	1.644,80	5,7	7,2	12,9	6,3	7,5	13,8
8	Bekasi Utara	2.026,40	3,9	6,6	10,5	5,5	8,9	14,4
	Total Daerah Studi (*)	14.128,48	4,0	6,0	10,0	7,9	6,9	14,8
	Daerah Studi Tahun 2011 (**)							
1	Pondok Melati	113,17	2,56	9,78	12,34	19,2	10,11	29,31
2	Jati Sampurna	1701,56	2,56	7,92	10,48	30,22	6,39	36,61
3	Pondok Gede	1590,85	2,32	8,71	11,03	11,38	7,15	18,53
4	Jati Asih	2360,64	2,93	13,02	15,95	25,3	7,96	33,26
	Total Luas Daerah Studi 2011	6766,64	2,63	10,19	12,82	22,38	8	30,38
	Total Kota Bekasi	21.049,00	3,55	7,4	10,95	12,3	7	19,3
Sumber : *) : Hasil Analisis								
**) : Identifikasi RTH Kota Bekasi tahun 2011, Badan Lingkungan Hidup Kota Bekasi								

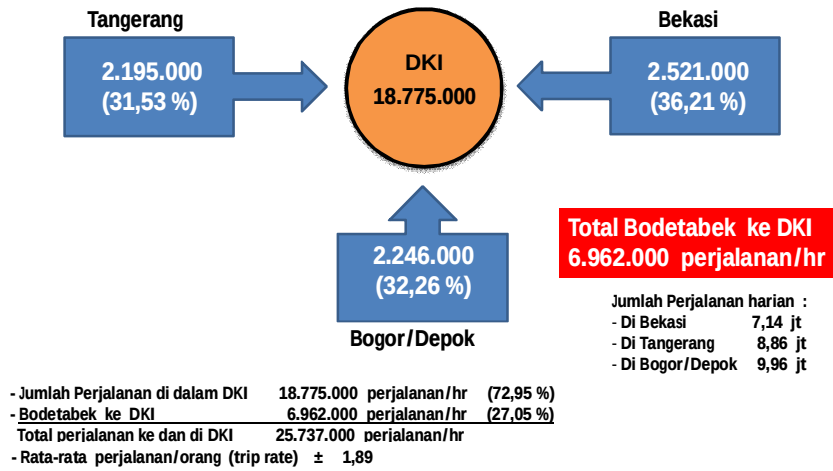
7. Perhubungan

Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Rasio izin trayek . Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bekasi umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan parapengendara angkutan umum. Data trayek AKAP (20 Trayek), AKDP (20 Trayek), Angkutan Kota (35 Trayek). Kinerja Jaringan Jalan di Kota Bekasi yaitu:

- V/C ratio rata-rata : 0,467
 - V/C ratio tertinggi: 2.56 yaitu Jl. Raya Pondok Gede
 - Kecepatan rata-rata : 46,53 km
- ❖ Angkutan kereta api di Kota Bekasi di bedakan atas dua jenis :
- Kereta Jabotabek (melayani pergerakan comutter /arah barat)
 - Kereta non-Jabotabek (melayani peregerakan ke arah Bandung, Cirebon, Jawa Timur dan Tengah/ arah timur)
- ❖ Terminal
- Terminal Induk , Luas $\pm$ 1,3 Ha dengan Emplacement dapat menampung 240 unit angkutan , lintasan yang ada 32 trayek angkutan kota, 22 trayek AKDP dan AKAP .
 - Terminal Kayuringin, Luas $\pm$ 2.400 m² , Emplacement dapat menampung 40 unit angkutan
 - Terminal pondok Gede, Luas $\pm$ 650 m² , Emplacement dapat menampung 240 unit angkutan , lintasan yang ada 22 trayek angkutan kota,

JUMLAH PERJALANAN HARIAN KOMUTER DARI BODETABEK KE JAKARTA TAHUN 2011

Source: February 2012 : Analysis by JAPTraPIS Study Team, Source Data JUTPI

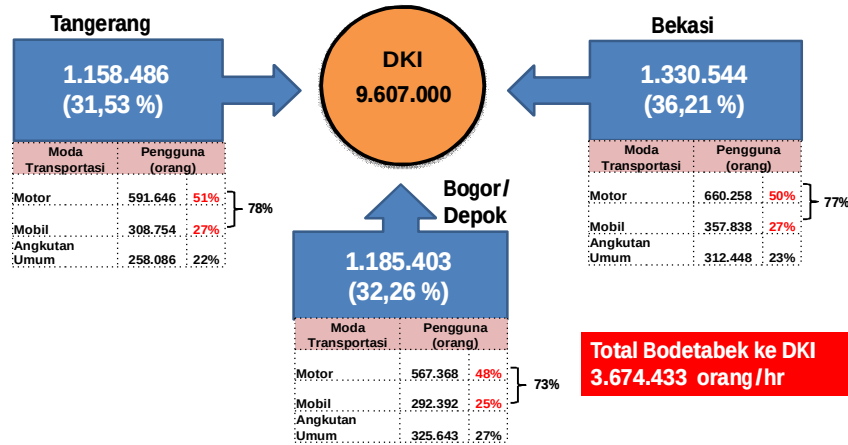


Konversi :

Perjalanan/hr → Orang/hr → Kendaraan/hr

JUMLAH ORANG YANG MELAKUKAN PERJALANAN DARI BODETABEK KE DKI JAKARTA (KOMUTER)

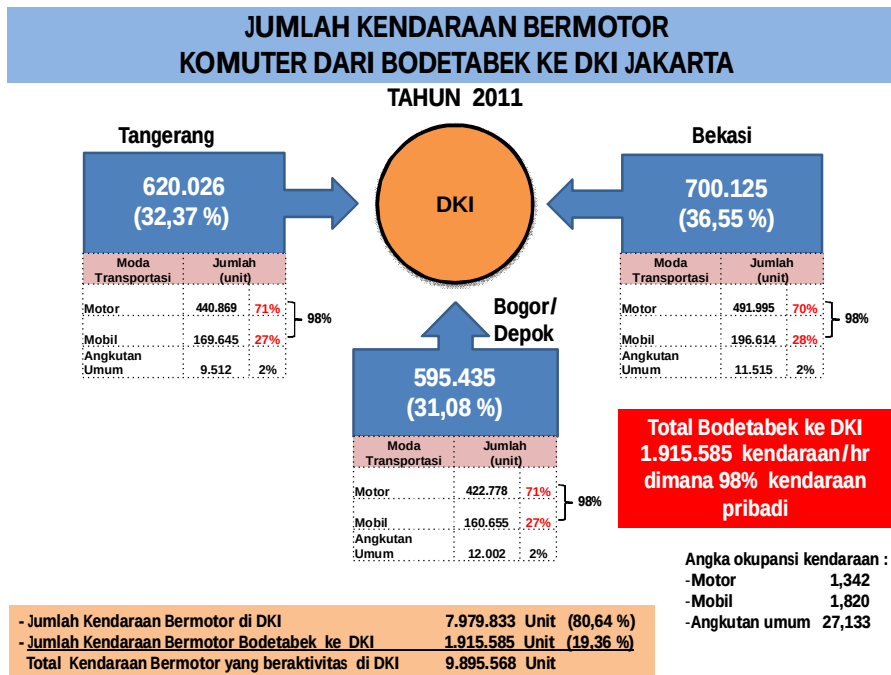
TAHUN 2011



- Jumlah Penduduk DKI 9.607.000 orang (72,33 %)

- Jumlah Komuter 3.674.433 orang (27,67 %)

Jumlah Yang beraktivitas di DKI 13.281.433 orang



8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bekasi adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk

meningkatkan manajemen persampahan kota setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya belum efektif untuk mengatasi masalah persampahan yang sudah sangat kompleks di Kota Bekasi. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.584.427 jiwa pada tahun 2010 dan produksi sampah per jiwa 0,00275 m³ per hari maka timbulan sampah kota setiap harinya adalah 1.777 ton per hari. Pengelolaan persampahan saat ini yang hanya mencakup 46.23% dari keseluruhan timbulan sampah kota sementara 53,77% belum diolah dengan benar maka pemerintah kota berupaya untuk mencari alternatif pengolahan sampah yang paling tepat.

Pengangkutan sampah ini dilakukan dengan mobil dump truck terbuka dan arm roll yang dilengkapi container. Truck ini tanpa dilengkapi dengan penampungan air licit sehingga air licit sampah yang diangkut secara otomatis menetes sepanjang rute perjalanan truck sampai ke TPA. Keterbatasan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Kota Bekasi juga merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat pelayanan. Dengan jumlah armada sebanyak 86 yang dimiliki saat ini (table 7) mengakibatkan jumlah sampah yang diangkut ke TPA kurang dari 50% total timbulan sampah yang dihasilkan.

Tabel 2.28. Data Armada Pengangkutan Sampah Kota Bekasi Tahun 2010.

Peralatan	Jumlah
Dump Truck Kapasitas 6m ³	67 unit
Arm Roll Kapasitas 4m ³	19 unit
Gerobak Kapasitas 1 m ³	275 unit
Gerobak Motor Kapasitas 1 m ³	2 unit

Sumber : Dinas Kebersihan Tahun 2011

9. Pertanahan

Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya data terkait persentase luas lahan bersertifikat di Kota Bekasi.

B. Fokus Urusan Pilihan

1. Investasi

Investasi merupakan salah satu cara percepatan pertumbuhan perekonomian yang dapat diandalkan oleh Kota Bekasi, mengingat penanaman modal oleh pihak swasta akan turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dimana trickle down effect yang dihasilkan oleh pertumbuhan investasi yang positif sangatlah besar dan memberikan manfaat yang baik bagi Kota Bekasi.

Pertumbuhan investasi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui beberapa indikator, indikator pertama untuk mengukur tingkat pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah jumlah pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap tahunnya. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2010, pemohon SIUP selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan pemohon SIUP sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan lebih dari 25% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2010 tercatat terdapat 606 permohonan SIUP untuk usaha

kecil, 1869 SIUP perusahaan menengah dan 451 SIUP perusahaan besar. Disamping itu permohonan Izin Usaha Industri juga mengalami pertumbuhan yang positif dimana apabila pada tahun 2008 terdapat 96 permohonan Izin Usaha Industri, maka pada tahun 2009 terdapat 135 permohonan dan pada tahun 2010 mencapai 171 permohonan Izin Usaha Industri. Perkembangan investasi dari sisi permohonan izin terlihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.29

Perkembangan Permohonan Izin Usaha di Kota Bekasi
Tahun 2008-2011

Uraian	2008	2009	2010
SIUP Perusahaan Kecil	N/A	N/A	606
SIUP Perusahaan Menengah	N/A	N/A	1869
SIUP Perusahaan Besar	N/A	N/A	451
Izin Usaha Industri	96	135	171

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2011

Selain melalui jumlah pemohon perizinan usaha, indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan investasi di Kota Bekasi adalah nilai investasi dari masing-masing kategori industri yang terdapat di Kota Bekasi. Tabel 2.29 menunjukkan nilai investasi dari masing-masing kategori industri di Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008-2011.

Pada Tabel 2.28 tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah

investasi yang sangat signifikan pada kategori industri kimia dimana pada tahun 2008 nilai investasi pada jenis industri ini hanya berjumlah Rp. 18,564,550,000 sedangkan pada tahun 2011 nilai investasi pada jenis industri ini mencapai Rp. 199,878,000,000. Begitu pula tren pada jenis industri agro dan hasil hutan yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011. Namun di lain pihak, justru terjadi penurunan nilai investasi pada jenis industri logam, mesin dan elektronika dimana pada tahun 2008 nilai investasinya mencapai Rp. 120,790,972,000 sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi Rp. 89,687,005,000.

Tabel 2.30. Nilai Investasi berdasarkan Kategori Industri di Kota Bekasi
Tahun 2008-2011

Tahun	Industri Logam, Mesin, dan Elektronika	Industri Agro dan Hasil Hutan	Industri Kimia
2008	120,790,972,000	83,611,470,000	18,564,550,000
2009	60,364,363,480	19,058,176,270	26,351,500,000
2010	81,553,560,000	96,089,703,000	76,939,250,000
2011	89,687,005,000	133,348,516,000	199,878,000,000

Sumber: BKPM Kota Bekasi, 2011

BAB III

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJP Kota Bekasi, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar

penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kota Bekasi . Urusan wajib, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (basic need) masyarakat di daerah tersebut. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib meliputi 26 urusan. Permasalahan pembangunan terkait urusan wajib pada dasar

1. Bidang Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat di Kota Bekasi. Salah satu sektor yang harus diperhatikan adalah sektor pendidikan. Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan dapat diketahui melalui peningkatan capaian angka melek huruf (AMH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS). Adapun komponen pendukung yang dapat mengakselerasi capaian 2 (dua) indikator makro pendidikan tersebut yaitu angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka pendidikan yang ditamatkan meliputi setiap tingkatan pendidikan, Sedangkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas maka hal-hal yang tidak boleh dilupakan yaitu mengidealkan rasio guru terhadap murid, dan rasio sarana prasarana pendidikan. Keberpihakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari upaya perbaikan yang dilakukan dalam urusan pendidikan serta besarnya porsi anggaran yang disiapkan dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan, dengan harapan dapat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan:

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pembangunan sektor pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2009/2010 telah mengalami perbaikan dan peningkatan, namun untuk mencapai/melampaui standar nasional masih perlu dilakukan upaya yang kreatif dan inovatif sehingga permasalahan yang ditemui mendapatkan solusi yang berdampak positif bagi dunia pendidikan di Kota Bekasi. Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang pendidikan di Kota Bekasi adalah :

- Masih terjadinya putus sekolah, bahkan di tingkat pendidikan dasar (SD). Data menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka putus sekolah pun semakin tinggi. Demikian juga dengan angka melanjutkan sekolah, yang menunjukkan pola yang sama. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka melanjutkan sekolahnya pun semakin kecil.
- Belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- Masih rendahnya akses masyarakat, khususnya anak dari keluarga miskin kepada layanan pendidikan.

2. Kesehatan

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan terus ditingkatkan keberadaan dan kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk

menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan adalah capaian angka harapan hidup (AHH). Bila dilihat dari data, angka harapan hidup masyarakat di Kota Bekasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan ini belum mencapai standar yang telah ditetapkan di Indonesia. Untuk meningkatkan angka harapan hidup ini, Pemerintah Kota Bekasi perlu meningkatkan pelaksanaan program pembangunan kesehatan, pembangunan sosial serta pemberantasan kemiskinan. Program ini mencakup sosialisasi tentang tingkat kecukupan gizi dan kalori, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio posyandu dan puskesmas per satuan penduduk di Kota Bekasi telah melampaui standar nasional. Hal ini menunjukkan upaya yang serius dalam peningkatan derajat kesehatan bayi dan masyarakat di kelurahan / kecamatan. Namun, rasio rumah sakit masih belum memenuhi standar. Kurangnya keberadaan rumah sakit dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab masih rendahnya angka harapan hidup di Kota Bekasi.

Permasalahan:

- Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Bekasi
- Tidak meratanya persebaran rumah sakit di Kota Bekasi. Kurangnya jumlah rumah sakit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Bekasi.
- Kurangnya jumlah rasio ketersediaan Pustu dan Puskesmas terhadap jumlah penduduk. (ratio sudah ideal) tapi masyarakat menginginkan akses ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal

3.Pekerjaan Umum

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi jalan. Panjang jalan kota Bekasi dalam kondisi baik adalah 125,88 km (tahun 2011), 85 % dari panjang jalan (1.324,56 km) dan panjang jalan yang rusak (tahun 2011) 198,68 km atau 15 %. Hal ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan akses, pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan:

- Masih tingginya angka kerusakan jaringan jalan di Kota Bekasi perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- Masih kurangnya pembangunan drainase dan belum terintegrasi saluran drainase primer , sekunder dan tersier yang ada serta masih belum optimalnya pemeliharaan saluran drainase sehingga saluran yang ada tidak dapat menampung air limpasan air hujan
- Masih bergabung antara saluran drainase air limbah dengan saluran drainase air hujan.
- Belum terkendalinya banjir di Kota Bekasi

4. Perumahan Rakyat

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Hingga tahun 2012,

hanya 3.207,73 Ha. luas permukiman di Kota Bekasi yang telah tertata. Hal ini berarti kawasan permukiman yang belum tertata dan dilengkapi dengan sarana prasarana standar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut masih cukup luas. Perbaikan sarana dan prasarana dasar pemukiman perlu diupayakan secara berkelanjutan melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pencapaian MDG's.

Persentase kawasan permukiman yang layak huni di Kota Bekasi hanya 4,5%, namun persentase rumah (individual dan terorganisir) yang dinyatakan layak huni cukup baik, yaitu 85 %. Kondisi layak huni yang dimaksud dalam hal ini adalah memenuhi standar dan kriteria perencanaan perumahan di lingkungan perkotaan, yaitu SNI 03-1733-2004. Beberapa indikator untuk menyatakan layak hunian sebuah rumah adalah adanya akses air bersih dan sistem sanitasi. Rumah tinggal yang telah memiliki sanitasi di Kota Bekasi. di Kota Bekasi belum memadai akses terhadap air bersih. Angka ini merupakan pencapaian yang kurang, karena belum seluruh rumah tinggal di Kota Bekasi dilayani oleh jaringan utilitas.

Permasalahan :

- Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di Kota Bekasi. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman .

5. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang efisien dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu

kawasan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyeimbangkan penggunaan ruang perkotaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur bahwa suatu kawasan harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, dimana 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Bekasi pada tahun 2012, sebesar 10,8 %. Hal ini berarti, RTH Kota Bekasi belum memenuhi target nasional. Perlu dilakukan peningkatan ketersediaan RTH, karena RTH merupakan faktor yang berperan penting bagi perkembangan kawasan dan kesejahteraan masyarakat. RTH memiliki beberapa 2 fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial - ekonomi. Fungsi ekologis RTH adalah meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan mengatur iklim mikro di kawasan tersebut. Fungsi sosial-ekonomi RTH adalah sebagai ruang interaksi sosial, sebagai sarana rekreasi serta sebagai lambang (landmark) suatu kawasan. Perizinan merupakan salah satu proses pengendalian penataan ruang. Dengan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB), pemerintah mengontrol jumlah dan lokasi bangunan sehingga sesuai dengan arahan RTRW.

Kota Bekasi merupakan hilir dari Sungai Cileungsi dan Cikeas. Alih fungsi lahan yang terjadi di sepanjang daerah aliran sungai, menyebabkan terjadinya banjir tahunan di wilayah Kota Bekasi.

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui buku-buku rencana yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku

rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut.

Pada tahun 2013, Kota Bekasi belum memiliki RPJP, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang telah dilegalisasi. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat dan sektor swasta tidak dapat berpartisipasi dalam rangka menyelaraskan program-program jangka pendek menengah dengan tujuan jangka panjang pembangunan daerah Kota Bekasi.

Permasalahan :

- Tidak tersedianya Dokumen RPJP, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang telah dilegalisasi.

7. Perhubungan

Baiknya pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Pada tahun 2012 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan baru mencapai V/C ratio rata-rata 0,467, V/C ratio tertinggi 2.56 yaitu Jl. Raya Pondok Gede , Kecepatan rata-rata 46,53 km. Hal ini berarti belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertambahan kendaran tiap tahunnya. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi

Permasalahan :

- Rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Bekasi
- Rendahnya jumlah rambu-rambu lalu lintas di Kota Bekasi
- Banyaknya commuter dari dan ke Jakarta dibandingkan dengan sarana transportasi yang tersedia
- Banyaknya titik kemacetan pada simpang – simpang jalan

8. Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan dilaksanakannya penataan ruang perkotaan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut hasil analisis, pada tahun 2010 sampah yang telah ditangani dan produksi sampah per jiwa 0,00275 m³ per hari maka timbulan sampah kota Bekasi setiap harinya adalah 1.777 ton per hari. Pengelolaan persampahan saat ini yang hanya mencakup 46.23% dari keseluruhan timbulan sampah kota Bekasi sementara 53,77% belum diolah dengan benar maka pemerintah kota berupaya untuk mencari alternatif pengolahan sampah yang paling tepat. Angka ini menunjukkan tingginya ketidakseimbangan lingkungan hidup di Kota Bekasi, yang dapat menyebabkan berbagai bencana, seperti banjir, longsor sampah, penularan penyakit melalui sampah kepada manusia dan hewan, dan sebagainya. Rendahnya tingkat penanganan sampah di Kota Bekasi disebabkan oleh kurang tersedianya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) dan akhir (TPSA), sehingga sebagian besar masyarakat membuang sampahnya secara sembarangan. Masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama guna meningkatkan penanganan sampah agar terjadinya bencana tersebut dapat dihindari atau diminimalisasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh BPLH setiap tahun sejak tahun 2001. Evaluasi terhadap hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya. Pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet untuk menentukan status mutunya. Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan menggunakan metode Storet dengan baku mutu air Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bekasi pada tahun 2011 yang dibandingkan dengan Baku Mutu Air PP No 82 tahun 2011 serta dengan menggunakan Metode Storet guna mengetahui Status Mutu Air, berdasarkan Pergub Jawa Barat No. 69 tahun 2005 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Status Kelas dan Mutu Air Sungai Utama di Kota Bekasi Tahun 2011

No	Nama Sungai	Kelas PP No 82 Tahun 2001	Status Pergub Jabar No. 69/2005 (Metode Storet)
1	Kali Cikeas	II	CEMAR SEDANG
2	Kali Cileungsi	II	CEMAR SEDANG
3	Kali Bekasi	II	CEMAR BERAT

4	Kali Baru	II	CEMAR BERAT
5	Saluran Sekunder	II	CEMAR SEDANG

Sumber : BPLH Kota Bekasi, 2011

Permasalahan :

- Masih rendahnya kualitas air sungai
- Menurunnya kualitas udara ambient
- Masih rendahnya penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
- Tingginya jumlah sampah yang belum dapat ditangani.
- Kurangnya peran serta masyarakat untuk mengelola sampah lingkungannya sebelum dibuang ke TPSS atau TPSA.
- Kurang tersedianya TPSS dan TPSA yang memadai.

9. Pertanahan

Identifikasi masalah pada bidang pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagai kepastian dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kota Bekasi belum memiliki data tentang pertanahan, berupa data administrasi kepemilikan lahan di wilayahnya.

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan

Pemerintah Kota Bekasi Urusan pilihan, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Terdapat 8 bidang/sektor yang menjadi urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

1. Perindustrian dan Pariwisata

Permasalahan pembangunan pada aspek perindustrian dan pariwisata adalah terkait dengan daya serap industri terhadap tenaga kerja. Sebagai salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, sudah seharusnya pertumbuhan industri - industri yang terjadi di Kota Bekasi memberikan dampak yang positif terhadap daya serap tenaga kerja bagi penduduk Kota Bekasi. Selain itu, sebagai dua sektor dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Bekasi, kedua sektor ini perlu mendapat perhatian yang besar sehingga dapat dioptimalkan potensinya bagi pembangunan Kota Bekasi.

Selain daya serap tenaga kerja, permasalahan yang sering terjadi pada sektor industri adalah kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan, dimana bila hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian Kota Bekasi, juga terhadap pekerja dan perusahaan itu sendiri.

2. Kebudayaan dan Kesenian

Sebagai salah satu kota yang punya nilai sejarah, Kota Bekasi menyimpan banyak potensi budaya dan kesenian yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan Kota Bekasi. Namun diluar hal tersebut, upaya-upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kesenian asli Kota Bekasi perlu mendapat perhatian yang baik mengingat besarnya arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi. Saat ini Kota Bekasi memiliki beberapa bangunan dan monumen bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan kebudayaan dan kesenian Kota Bekasi.

3. Kepemudaan dan Olahraga

Tingginya jumlah generasi muda di Kota Bekasi perlu mendapat perhatian yang baik agar hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik. Potensi generasi muda Kota Bekasi yang besar perlu diarahkan untuk memberikan kekuatan bagi pembangunan kota dan meminimalisir potensi-potensi negatif yang dapat timbul dari pergaulan generasi muda. Selain itu pada sisi kepemudaan, bidang olahraga Kota Bekasi yang memiliki potensi yang besar perlu terus dibina sehingga dapat mengangkat potensi dan daya saing Kota Bekasi diantara wilayah-wilayah lain.

3.2.Tantangan

3.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Kota Bekasi akan menghadapi tantangan untuk mengendalikan pertumbuhan, persebaran, kualitas penduduk serta penyediaan kebutuhan bagi kehidupan penduduk di masa mendatang. Dalam dua puluh tahun mendatang, Kota Bekasi menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi. Pengendalian jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya perlu diperhatikan untuk terwujudnya penduduk yang tumbuh dengan seimbang guna peningkatan kualitas, daya saing dan kesejahteraannya. Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan antara wilayah perkotaan dapat dikurangi. Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM dan komponenkomponennya. Pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat harus senantiasa ditingkatkan untuk menjamin peningkatan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan, disamping untuk terus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

Perwujudan sektor pendidikan harus berkorelasi dengan sumber daya manusia yang selain memiliki keterampilan berdasarkan pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta moralitas dan juga memiliki komitmen terhadap perkembangan kemajuan masyarakat. Pendidikan di Kota Bekasi hingga saat ini masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan mutu, sedangkan keberadaan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kondisi mutu sumber daya manusia (SDM). Dalam perspektif teori pembangunan, akan sulit mencapai sasaran yang diharapkan, yaitu terjadinya perubahan yang mengarah kepada perbaikan taraf hidup rakyat, apabila kondisi SDM kurang bermutu. Indikator utama mutu SDM adalah derajat kesehatan, kemampuan dan moralitasnya. Hal lain yang harus dijadikan landasan adalah bahwa masa depan berhubungan dengan pendidikan berkelanjutan bagi siapapun yang ingin kembali mempelajari perilaku dan kemampuan baru. Konsep ini mengandung makna, bahwa pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan dan sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Termasuk didalamnya, pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan ber peradaban global. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi melalui pengembangan inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih tanggap teknologi, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan budaya lokal, peningkatan kualitas lulusan untuk mengantisipasi tingkat persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam hal pengembangan sains dan teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan penanganan yang optimal. Tingginya kesenjangan status kesehatan dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan

merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Memperhatikan hal tersebut, pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, perlu juga didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur panjang. Untuk mencapai keadaan tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pembangunan yang diwujudkan bersama dengan masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan kondisi terbaik bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, pembangunan sarana dan prasarana keagamaan, pengkajian dan aplikasi ajaran agama, pengembangan seluruh potensi umat dalam menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan proporsional, pengelolaan sumber dana keumatan berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan yang dianut merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang keagamaan.

3.2.2 Ekonomi

Pesatnya pertumbuhan ekonomi membutuhkan teknologi tinggi untuk mempercepat produksi. Percepatan ini dipengaruhi oleh kecepatan transaksi, perumusan ide-ide baru dalam pergerakan ekonomi, aliran sumber daya, dan kecepatan data, informasi serta pengetahuan terhadap sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi Kota Bekasi dua puluh tahun mendatang dihadapkan pada tantangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk

mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2005–2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 4% sampai 7% per tahun. Tren ekonomi dimasa yang akan datang akan bergantung pada pengetahuan, jaringan informasi akan menjadi jantung dari infrastuktur baru. Sistem ekonomi baru bergantung pada mobiltas komunikasi elektronik.

Karakteristik ekonomi beberapa tahun yang akan datang akan ditandai dengan persaingan ekonomi internasional secara besar-besaran, arah pertumbuhan bisnis global dan aliran sumber daya, dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar. Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan dan masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investor agar dapat menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor penentu untuk menarik investasi baru. Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki struktur

keterkaitan dan kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan tangguh di pasar domestik maupun internasional.

Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin terus berkurang.

3.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Perubahan datang secara bergelombang dan sangat cepat. Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari keunggulan berdasarkan sumber daya yang dimiliki (*resource-based competitiveness*) menjadi keunggulan berdasarkan pengetahuan (*knowledge-based competitiveness*). Karena itu kemampuan suatu daerah untuk menguasai IPTEK menjadi salah satu factor dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka peningkatan kemampuan IPTEK, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan IPTEK yang ditunjang oleh ketersediaan kualitas sumber daya IPTEK, diantaranya SDM yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pembangunan IPTEK mendatang, mengacu pada nilai-nilai luhur yaitu dapat dipertanggungjawabkan, prima, inovatif dan berpandangan jauh ke depan.

3.2.4 Infrastruktur Wilayah

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di Kota Bekasi adalah

meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan meliputi pengembangan angkutan umum massal terutama untuk daerah yang berpenduduk padat; pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien berupa jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal; pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisien dan efektif; pengembangan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersifat alami maupun buatan untuk meminimalisasi terjadinya bencana banjir dan kekeringan; pengembangan jaringan telekomunikasi baik yang menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel, pengembangan sarana dan prasarana dasar pemukiman, berupa pengembangan rumah susun, meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dan sanitasi lingkungan serta pengembangan pengelolaan sampah yang berskala regional. Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana wilayah antara lain dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta kemampuan lembaga pengelola.

3.2.5 Politik, Hukum dan Ketertiban masyarakat

Keberhasilan pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi warga yang meliputi kebebasan politik dan akuntabilitas. Partisipasi warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam tatakelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat, agar aspirasi masyarakat dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain dengan partisipasi masyarakat tingkat legitimasi pemerintah yang berkuasa dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena partisipasi sejalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Tolak ukur partisipasi adalah ketersediaan lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan seperti jumlah partai politik dan ormas; ketersediaan institusi mediasi yang merupakan cerminan masyarakat madani (*civil society*) seperti jumlah organisasi non pemerintah dan pers; proporsi

keterwakilan partai politik di lembaga legislatif; proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; tingkat partisipasi pemberian suara; jumlah unjuk rasa dan pemogokan kerja; serta keikutsertaan warga dalam berbagai kegiatan dan tingkatan. Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Kota Bekasi, diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis. Proses pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan kecepatan, serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui penguatan masyarakat madani (*civil society*) yang terbuka terhadap perubahan. Termasuk keinginan masyarakat untuk membentuk daerah otonom akan terus bermunculan selama aspirasi masyarakat belum dapat diakomodir dengan tepat, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengalami hambatan. Pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diukur berdasarkan orientasi pemerintah (*government orientation*) yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/ efisiensi yudisial. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu,

konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat pada pemegang otoritas. Pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan penegakan aturan tersebut guna hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga berkaitan dengan penegakkan hukum secara berkeadilan. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat merupakan faktor utama yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menyelenggarakan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi. Potensi ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat akan dihadapi dari friksi dan konflik sosial terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Juga akibat dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

3.2.6 Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan sumber daya termasuk di dalamnya penataan struktur organisasi, penataan kesisteman, dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, profesional dan disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tantangan yang dihadapi sampaidengan 2025 diantaranya adalah masih rendahnya kinerja aparatur karena

adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), masih rendahnya kualitas SDM aparatur, dan rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; struktur organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan daerah, kesisteman yang mampu menjadi acuan dalam proses administrasi pemerintahan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal, dan budaya organisasi yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Birokrasi yang modern dan mampu menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi yang mampu memformulasikan kebijakan sesuai dengan keinginan politik dan aspirasi masyarakat dan dapat mengimplementasikannya secara bertanggung jawab. Aspek lain yang penting perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan 20 tahun kedepan adalah mengenai pengelolaan/ manajemen keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Untuk itu, Pemerintah daerah harus membuat kebijakan pengelolaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen aset adalah metode yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atas aset.

3.2.7 Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tantangan jangka panjang yang dihadapi adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan penetapan regulasi/ landasan

yuridis agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Tantangan lainnya adalah mengembangkan Pusat Kegiatan Ekonomi Wilayah sehingga dapat berkembang secara merata dan optimal serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di perkotaan. Tantangan aspek pola tata ruang adalah penyediaan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman terutama di kawasan perkotaan dalam kondisi luasan lahan yang ada sangat terbatas. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

3.2.8 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tantangan besar yang dihadapi Kota Bekasi sampai tahun 2025 adalah memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus ditumbuh kembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin, ditopang IPTEK yang memadai sehingga memberikan nilai tambah yang berarti. Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini

sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antar pihak atau antar daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar, pola pembagian peran hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan. Pengawasan secara berkesinambungan dan penegakan hukum secara konsisten adalah sasaran dalam rangka pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal. Pemahaman risiko bencana harus mulai diintegrasikan pada

proses pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin timbul atas hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

3.3. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain:

1. Posisi wilayah Kota Bekasi yang Strategis

posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan memiliki peran sebagai pengimbang (*counter magnet*) ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta), maka berbagai kebijakan pembangunan yang digariskan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional (terutama Jakarta). Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi

2. Ketersediaan Sumber daya Alam

Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan tidak memiliki sumber daya alam yang potensial. Sumber daya alam yang berupa gas alam yang terletak di Kecamatan Jatisampurna dari hasil kajian sumber energi yang ada tidak mencukupi jika dimanfaatkan untuk jangka panjang 20 tahun bagi pengembangan perekonomian daerah. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Cabang Jakarta telah menyediakan supply gas yang melayani Jakarta, Bekasi, Tangerang dan sekitarnya sebesar 120 mmscfd. Penyediaan energi gas tersebut diperkirakan akan mampu menggantikan energi BBM yang terserap di Bekasi sebesar 40%. Di wilayah Kota Bekasi terdapat stasiun

penerima Tegal Gede sebesar 60 mmscfd yang berhubungan dengan pipa induk menuju Kabupaten Karawang dan Purwakarta. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan baik secara teknis maupun dari segi ekonomis yang diproyeksikan dengan peningkatan jumlah penduduk kota Bekasi di masa depan, maka jaringan pipa distribusi gas disesuaikan dengan rencana tata ruang Kota Bekasi dan kondisi jalan serta *real estate* yang ada. PT PGN Cabang Jakarta merencanakan pengembangan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga sepanjang 79.000 meter dengan menggunakan pipa *polyethylene* berdiameter 63 mm–125 mm.

3. Jumlah penduduk yang relatif besar dan agamis

Jumlah penduduk Kota Bekasi yang diperkirakan pada tahun 2025 mencapai **4,203,213** juta penduduk, dengan tingkat kualitas SDM yang semakin meningkat, menjadi sumber daya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah. Masyarakat Kota Bekasi yang religius serta kerukunan antar umat beragama merupakan asset pembangunan yang cukup mempunyai andil besar dalam mensukseskan jalannya proses pembangunan.

Tabel 3.2 Perkiraan Penduduk Kota Bekasi per Kecamatan Tahun 2010-2025

No	Kecamatan	Luas	Penduduk 2005	LPP	Perkiraan Penduduk			2025	KPDT / Ha
		(Ha)			2010	2015	2020		
1	Pondok Gede	1629	196.318	3.1	229,063	267,270	311,849	363,277	223
2	Jati Sampurna	1449	69.759	3.2	81,685	95,650	112,002	131,107	90.5
3	Jati Asih	2200	168.21	2	185,972	205,609	227,321	250,981	114.1
4	Bantar Gebang	1704	72.114	2.7	82,363	94,068	107,437	122,746	72
5	Bekasi Timur	1349	243.552	3.1	284,071	331,330	386,452	450,183	333.7
6	Rawa Lumbu	1567	185.64	2.8	212,795	243,923	279,604	321,003	204.9

7	Bekasi Selatan	1496	185.776	2.8	213,782	246,011	283,097	325,013	217.3
8	Bekasi Barat	1889	259.308	2.8	297,139	340,488	390,162	447,930	237.1
9	Satria	1471	147.03	3.1	171,326	199,636	232,624	270,987	184.2
10	Bekasi Utara	1965	274.968	3	318,932	369,926	429,073	497,413	253.1
11	Mustika Jaya	2474	97.768	2.7	111,645	127,491	145,586	166,330	67.2
12	Pondok Melati	1857	101.456	3.1	118,359	138,079	161,084	187,649	101
	Bekasi	21049	2.001.899	2.9	2,307,132	2,659,481	3,066,291	3,534,618	167.9

4. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Bekasi yang tidak begitu luas namun strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, hal ini menjadi potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Ketersediaan sumber daya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik

bagi investor dan mempercepat proses pembangunandaerah

Potensi industri, jasa dan perdagangan yang menjadi komoditas andalan Kota Bekasi dari berbagai komoditi yang ada, potensi tersebut apabila dikembangkan secara optimal diharapkan dapat menjadi sektor andalan dalam menopang aktivitas perekonomian dan pembangunan.

6. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik

dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi.

3.4.Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Disamping RPJP Nasional, RPJM Nasional tahun 2010-2014 memberikan perhatian bagi peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan dimana Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang perlu melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan terutama melalui peningkatan porsi Ruang Terbuka Hijau hingga mencapai porsi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Perumusan isu strategis Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.

3.4.1 . Isu Strategis Kota Bekasi

Dengan memperhatikan berbagai tantangan di atas, isu strategis pembangunan di atasnya baik nasional maupun provinsi, maka isu strategis pembangunan Kota Bekasi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, Sarana dan prasarana, SDM, kualitas pelayanan dan pemerataan;
3. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan pemerataan
4. Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan
5. Masih belum optimalnya pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong ekonomi lokal;
6. Belum meratanya pembangunan serta rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum.
7. Pemenuhan kebutuhan sarana transportasi massal dalam memenuhi kebutuhan para penglaju (commuter) dari dan ke Jakarta yang masih tinggi.
8. Masih belum seimbangnya rasio kebutuhan infrastruktur dengan jumlah penduduk yang dilayani , serta peningkatan kualitas infrastruktur kota yang telah ada .
9. Penyiapan kelengkapan sarana dan kelembagaan yang lebih baik dalam penanganan masalah tanggap bencana (mitigasi bencana).
10. Penanganan masyarakat miskin perkotaan dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial yang berakibat pada kerawanan sosial.
11. Penanganan konflik buruh dan pengusaha yang akan berdampak pada masalah ekonomi dan masalah penyediaan lapangan kerja.
12. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan tingginya penyimpangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan tingkat kenyamanan dan mengancam terhadap keberlanjutan pembangunan

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

4.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 - 2025 adalah :

“Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan”

Visi dimaksud mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. **Kreatif** bermakna bahwa **seseorang atau sekelompok masyarakat** yang memiliki daya cipta, memiliki kemampuan menciptakan, kecerdasan, dan imajinasi. Sedangkan **produk dan jasa** yang kreatif mengandung unsur daya cipta, nilai inovasi, dan seni. Dalam menjalankan kreasinya, seseorang dapat melahirkan gagasan atau berkarya tidak seperti kebiasaan yang berlaku. Namun demikian karakter kreatif yang dikehendaki adalah kemampuan daya cipta yang tidak mengganggu ketertiban umum, norma sosial, kaidah agama, dan peraturan/perundangan yang berlaku;
2. Kota kreatif bermakna bahwa warga Kota Bekasi memiliki **semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreativitas**, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi **tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam**, dibutuhkan **nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha** dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha;

3. Nilai, sikap, dan perilaku kreatif ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan aparatur pemerintah daerah Kota Bekasi dalam merancang dan mengimplementasikan **sistem pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan, dan pembangunan sarana publik**, yang dapat memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan publik warga Kota Bekasi;
4. Nilai, sikap, dan perilaku kreatif ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan masyarakat, kelembagaan sosial masyarakat, dan lingkungan pendidikan, agar mampu **berkehidupan, berkarya, dan berprestasi**, dalam atmosfir dinamika perkotaan dan persaingan nasional/global;
5. **Input kreativitas** diarahkan untuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha Kota Bekasi agar **menghasilkan nilai tambah yang besar dan berdaya saing**. Input kreativitas bisa berbentuk desain yang kreatif, warna yang kreatif, bahan yang kreatif, atau juga cara memasarkan yang kreatif sehingga bisa menjadi komoditi yang dikenal/dicari/dikunjungi/dibeli selain oleh warganya sendiri, juga pelanggan dari luar kota atau bahkan dikenal di seluruh pelosok nusantara, atau bahkan dapat memperluas akses ke pasar ekspor;
6. Dalam perkembangan jangka panjang juga diharapkan muncul sejumlah **usaha (industri) kreatif** di Kota Bekasi seperti : periklanan, arsitektur, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, percetakan dan penerbitan, layanan komputer dan piranti lunak, TV dan radio, olah raga, wisata, serta riset dan jasa konsultasi;
7. **Ihsan** mempunyai arti baik (bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Al-Qur'an).Ihsan sebagai cita-cita luhur masyarakat Bekasi. Ihsan juga sebagai salah satu nilai yang dikembangkan masyarakat Bekasi. Secara sederhana setiap masyarakat awam akan segera dapat memahami kata "ihshan" berkonotasi "religius". Karena ihsan sering dijumpai dalam teks keagamaan (terutama Islam) yang menjadi agama mayoritas warga Kota Bekasi. Sehingga secara

substansial pencantuman kata “Ihsan” dalam visi Daerah menunjukkan keberpihakan dan mewadahi aspirasi religius yang ada di Kota Bekasi;

8. Ihsan berlaku bagi aparatur dalam menjalankan **pemerintahan yang baik** (*good governance*) dan berlaku bagi warga kota dalam **mentaati peraturan/perundangan** yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam **meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama**. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial, dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.
9. Sehingga secara keseluruhan, **Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan** bermakna bahwa warga Kota Bekasi memiliki **semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreativitas**, dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha, dengan tetap memelihara, mengamalkan, dan mengembangkan karakter dan jati diri masyarakat yang religius dan patriotik.

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025, ditandai dengan :

1. Semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi **nilai-nilai kreativitas tumbuh dan meluas, dipahami, dihayati, dan diamalkan** oleh aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha, untuk terus berjuang meningkatkan kesejahteraan dalam berkehidupan dan kemakmuran wilayah Kota Bekasi, memegang teguh keimanan dan ketaqwaan, serta menjalankan syariat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Dinamika pembangunan Kota Bekasi berjalan dan berkembang dengan **ikhtiar kreativitas** dari warga kotanya;

3. Kesejahteraan dalam berkehidupan yang meningkat dan kemakmuran wilayah Kota Bekasi yang berkembang dengan tetap memelihara karakter dan jati diri **masyarakat yang religius dan patriotik.**

4.2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kota Bekasi tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat, berakhlak mulia, berbudaya, berpengetahuan, dan produktif;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa dan perdagangan yang berdayasaing;
4. Mewujudkan pembangunan dan penyediaan sarana publik yang proporsional;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman.

Misi dimaksud mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bermakna bahwa tata pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran wilayah Kota Bekasi, melalui fungsi pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan, dan pembangunan, dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance*, yakni:
 1. Partisipasi masyarakat
 2. Tegaknya supremasi hukum
 3. Transparansi
 4. Kesetaraan
 5. Daya tanggap kepada *stakeholders*
 6. Berorientasi pada visi
 7. Akuntabilitas

8. Pengawasan
9. Efektivitas dan efisiensi
10. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem, dan unit kerja. Misi ini mengakomodasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan pemerintahan, hukum, dan politik;

2. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, berbudaya, dan produktif bermakna bahwa dalam rangka mencapai dinamika pembangunan Kota Bekasi yang berjalan dan berkembang dengan ikhtiar kreativitas dari warga kotanya perlu dipersiapkan, dibangun, dan dikembangkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, jaminan kesehatan, berperilaku sehat, moral kehidupan yang beradab dan berbudaya, akhlak yang baik dan terpuji, menjalankan syariat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa berikhtiar kreatif dalam kehidupan dan usaha, serta mampu berpartisipasi dalam dinamika tahapan pembangunan Kota Bekasi. Misi ini mengakomodasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, budaya, kehidupan beragama, ketenagakerjaan, kepemudaan, keolahragaan, dan pemberdayaan perempuan;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa dan perdagangan yang berdayasaing bermakna bahwa dinamika pembangunan Kota Bekasi berjalan dan berkembang dipacu oleh berkembangnya potensi usaha jasa dan perdagangan melalui kreativitas warga kotanya, yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memiliki daya saing yang kuat untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian nasional. Misi ini mengakomodasi pelaksanaan

tugas bidang pembangunan ekonomi dan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);

4. Mewujudkan pembangunan dan penyediaan sarana publik yang proporsional bermakna bahwa kemakmuran wilayah yang berkembang dengan terbangun/berdirinya sejumlah sarana bisnis perkotaan harus dapat serasi terhadap kepentingan kesejahteraan kehidupan warga kotanya, dengan pengaturan izin pembangunan sesuai dengan tata ruang kota dan memperhatikan ketersediaan/penyediaan prasarana dan sarana publik yang memadai. Misi ini mengakomodasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan prasarana dan sarana;
5. Mewujudkan kehidupan kota yang aman dan lingkungan hidup yang nyaman bermakna bahwa dinamika pembangunan Kota Bekasi harus diimbangi dengan pengendalian terhadap potensi kerawanan sosial, ekonomi, dan keamanan wilayah, serta pengendalian terhadap potensi dan dampak lingkungan hidup, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kotanya. Misi ini mengakomodasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan kehidupan perkotaan dan lingkungan hidup.

No.	MISI (Pernyataan Tugas dan Fungsi dalam mewujudkan VISI)	SASARAN (hal-hal yang harus dapat dicapai dalam menjalankan MISI)
1.	Mewujudkan <u>tata kelola pemerintahan yang baik</u> .	a. Meningkatnya <u>kinerja aparatur</u> yang memiliki komitmen tinggi mengamalkan 10 (sepuluh) prinsip <i>Good Government</i> untuk menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan, dan

		pembangunan; b. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas <u>organisasi pemerintahan</u> melalui implementasi sistem dan teknologi informasi yang mendukung kinerja aparatur; c. Terlaksananya <u>perencanaan pembangunan</u> secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi unsur dan lapisan masyarakat; d. Terbangunnya <u>mekanisme penetapan kebijakan</u> dalam pembangunan secara demokratis, dengan atmosfir politik yang kondusif, patriotik, dan ihsan; e. Meningkatnya komitmen dan kinerja <u>penegakan hukum</u> dan <u>perlindungan hak asasi manusia</u> untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban sosial.
--	--	---

2.	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat, berakhlak mulia, berbudaya, berpengetahuan, dan produktif.	a. Meningkatnya jenjang pendidikan dan lifeskill masyarakat; b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; c. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi kepemudaan di tingkat provinsi/nasional; d. Meningkatnya kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; e. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan; f. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial dan kapasitas penanganan masalah sosial; g. Berkembangnya budaya Kota Bekasi sebagai fungsi sosial, normatif, dan fungsi ekonomi; h. Meningkatnya fungsi kehidupan beragama dalam memelihara akhlak mulia, harmoni sosial, dan perilaku ihsan; i. Terkendalinya potensi kerawanan sosial dan keamanan wilayah; j. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. k. Terciptanya kerukunan hidup
----	---	--

		bersama I. Berkembangnya seni budaya lokal yang bersaing dengan masuknya budaya yang datang dari luar
--	--	---

3.	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa dan perdagangan yang berdayasaing.	a. Berkembangnya <u>usaha menengah, kecil, dan mikro</u> berbasis pengetahuan dan kreativitas; b. Terdayagunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk <u>meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing usaha</u> pembuatan boneka, konveksi, <i>furniture</i>, <i>handycraft</i>, makanan dan minuman, ikan hias, sepatu dan sandal, dan tanaman hias; c. Meningkatnya <u>investasi pelaku usaha swasta</u> terutama pada 4 (empat) sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran,
----	--	--

		pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa; d. Terdayagunakannya <u>sumber daya alam, potensi usaha, dan aset</u> yang dimiliki daerah; e. Meningkatnya <u>produk domestik regional bruto</u> untuk menjamin pertambahan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap perekonomian nasional.
4	Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang <u>adil, merata, memadai, maju, dan berkelanjutan.</u>	a. Terwujudnya <u>sistem transportasi publik</u> yang terintegrasi dengan kota/kabupaten dan provinsi lain; b. Terbangun dan terpeliharanya <u>jaringan jalan</u> kota yang menjamin kenyamanan berkendara dan kelancaran lalu lintas; c. Terpenuhinya <u>prasarana dan sarana publik</u> yang aman dan nyaman; d. Terpenuhinya alokasi peruntukkan <u>ruang terbuka hijau</u>; e. Terpenuhinya kebutuhan <u>air</u>

		bersih;
		f. Terwujudnya <u>sistem drainase</u> <u>dan terkendalinya bencana</u>
5.	Mewujudkan <u>lingkungan</u> <u>yang nyaman</u> .	a. Terkendalinya <u>potensi dan banjir</u>; <u>dampak lingkungan hidup</u>; g. Terkendalinya <u>pembangunan</u> b. Terkendalinya <u>penggunaan air pemukiman</u>, <u>tanah</u>; h. Tersedianya <u>sarana perdagangan</u> c. Meningkatnya kesadaran dan yang teratur, partisipasi masyarakat untuk i. <u>Terbangun dan terpeliharanya</u> <u>berperilaku ramah lingkungan</u>; <u>sarana olahraga skala kota dan</u> d. Meningkatnya kesadaran kecamatan, masyarakat atas <u>potensi</u> j. <u>Terkelolanya sistem</u> <u>bencana alam</u>. persampahan dan kebersihan
		kota;
		k. Terpenuhinya kebutuhan <u>energi</u> .

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Bekasi, ditentukan sasaran pembangunan pada setiap misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai oleh hal-hal berikut :
 - a. Meningkatnya **kinerja aparatur** yang memiliki komitmen tinggi mengamalkan 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance* untuk menjalankan fungsi pelayanan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan, dan pembangunan;
 - b. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan produktivitas **organisasi pemerintahan** melalui implementasi sistem dan teknologi informasi yang mendukung kinerja aparatur;
 - c. Terlaksananya **perencanaan pembangunan** secara berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi unsur dan lapisan masyarakat;
 - d. Terbangunnya **mekanisme penetapan kebijakan** dalam pembangunan secara demokratis, dengan atmosfir politik yang kondusif, patriotik, dan religius;
 - e. Meningkatnya komitmen dan kinerja **penegakan hukum** dan **perlindungan hak asasi manusia** untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban sosial.
2. Terwujudnya kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, berbudaya, dan produktif, ditandai oleh hal-hal berikut :
 - a. Meningkatnya **jenjang pendidikan dan lifeskill masyarakat**;
 - b. Meningkatnya **derajat kesehatan masyarakat**;

- c. Meningkatnya **partisipasi pemuda** dalam pembangunan dan prestasi kepemudaan ditingkat provinsi/nasional;
 - d. Meningkatnya kegiatan **olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi**;
 - e. Meningkatnya **kesetaraan jender** dalam pembangunan;
 - f. Meningkatnya **pelayanan kesejahteraan sosial** dan kapasitas penanganan masalah sosial;
 - g. Berkembangnya **budaya** Kota Bekasi sebagai fungsi sosial, normatif, dan fungsi ekonomi;
 - h. Meningkatnya fungsi **kehidupan beragama** dalam memelihara akhlak mulia, harmoni sosial, dan perilaku ihsan;
 - i. Terkendalinya potensi kerawanan sosial dan **keamanan wilayah**;
 - j. Meningkatnya **kualitas kehidupan masyarakat**;
3. Meningkatnya **perekonomian berbasis potensi jasa dan perdagangan yang berdayasaing** ditandai oleh hal-hal berikut :
- a. Berkembangnya **usaha menengah, kecil, dan mikro** berbasis pengetahuan dan kreativitas;
 - b. Terdayagunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan **nilai tambah dan memperkuat daya saing usaha** pembuatan boneka, konveksi, *furniture*, *handycraft*, makanan dan minuman, ikan hias, sepatu dan sandal, dan tanaman hias;
 - c. Meningkatnya **investasi pelaku usaha swasta** terutama pada 4 (empat) sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa;
 - d. Terdayagunakannya **sumber daya alam, potensi usaha, dan aset** yang dimiliki daerah;
 - e. Meningkatnya **produk domestik regional bruto** untuk menjamin pertambahan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap perekonomian nasional.

4. Terwujudnya pembangunan dan penyediaan sarana publik yang proporsional ditandai oleh hal-hal berikut :

- a. Terwujudnya **sistem transportasi** publik yang terintegrasi dengan kota/kabupaten dan provinsi lain;
- b. Terbangun dan terpeliharanya **jaringan jalan** kota yang menjamin kenyamanan berkendara dan kelancaran lalu lintas;
- c. Terbentuknya jaringan jalan yang menjadi poros penghubung Utara - Selatan dan Barat - Timur
- d. Terpenuhinya **prasarana dan sarana publik** yang aman dan nyaman;
- e. Terpenuhinya alokasi peruntukkan **ruang terbuka hijau**;
- f. Terpenuhinya kebutuhan **air bersih**;
- g. Terwujudnya **sistem drainase dan terkendalnya bencana banjir**;
- h. Terkendalnya **pembangunan pemukiman** ;
- i. Terkendalnya **sarana perdagangan** yang teratur;
- j. Terbangun dan terpeliharanya **sarana olahraga** skala kota dan kecamatan;
- k. Terkelolanya **sistem persampahan dan kebersihan** kota;
- l. Terpenuhinya kebutuhan **energi**.

5. Terwujudnya lingkungan yang nyaman ditandai oleh hal-hal berikut :

- a. Terkendalnya **potensi dan dampak lingkungan hidup**;
- b. Terkendalnya **penggunaan air tanah**;
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk **berperilaku ramah lingkungan**;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas **potensi bencana alam**.

5.1. Arah Pembangunan

5.1.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- a. Peningkatan kinerja aparatur melalui;
 1. penegakan disiplin pegawai, sistem remunerasi, dan sistem apresiasi pegawai;
 2. pengangkatan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi sumber daya pegawai yang diperlukan;
 3. peningkatan kualitas sumber daya aparatur : orientasi pembangunan, pelatihan, dan studi lanjut;
 4. penempatan aparatur dan pengembangan pola karir pada struktur organisasi dan pemerintahan yang berorientasi pada profesionalitas, kompetensi, kapabilitas, dan komitmen.

- b. Peningkatan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas organisasi pemerintahan melalui :
 1. peningkatan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas organisasi pemerintahan melalui :
 - pengembangan modelling sistem perencanaan berbasis IT pada skpd strategis;
 - pengembangan pangkalan data pembangunan Kota Bekasi;
 - pengembangan e-goverment;
 2. layanan informasi pembangunan (via internet) bagi publik skala kota dan skala kecamatan (“Graha Pustaka dan Informasi Daerah”)
 3. pengembangan sistem pencatatan kependudukan yang akurat dan terpadu melalui *Single Identity Number*;

4. pengembangan sistem pelayanan perijinan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
 5. pembangunan ruang publik informasi tentang dinamika pembangunan daerah berbentuk : “Galeri Pembangunan Daerah”.
- c. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan melalui :
1. peningkatan kualitas partisipasi masyarakat yang secara terfokus dapat berperan pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan;
 2. peningkatan kualitas kajian pembangunan berbasis data primer melalui survey yang menunjang kebutuhan data untuk proses perencanaan;
 3. peningkatan kualitas perencanaan dengan memanfaatkan output modelling sistem perencanaan berbasis IT pada masing-masing skpd strategis.
- d. Pengelolaan mekanisme penetapan kebijakan dalam pembangunan secara demokratis, dengan atmosfir politik yang kondusif, patriotik, dan ihsan, melalui :
1. peningkatan kinerja fungsi pengaturan, penganggaran, dan pengawasan;
 2. internalisasi nilai dan sikap demokratik, patriotik, dan ihsan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia untuk menjamin ketentraman dan ketertiban sosial melalui :
1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik dalam kehidupan berdemokrasi;

2. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi peraturan daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban sosial.
3. Terciptanya budaya hukum bagi masyarakat yang mengarah pada kehidupan masyarakat yang taat dan patuh pada setiap peraturan .

5.1.2 Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sehat, Berakhlak Mulia, Berbudaya, Berpengetahuan, dan Produktif

- a. Peningkatan jenjang pendidikan dan *lifeskill* masyarakat, melalui :
 1. pemerataan akses pendidikan Wajib Belajar 12 tahun;
 2. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 3. pengembangan sekolah berstandar internasional;
 4. pengembangan lembaga pendidikan yang mampu membentuk kompetensi dan kreativitas bagi lulusan sekolah menengah, serta *lifeskill* bagi masyarakat;
 5. peningkatan kapasitas organisasi penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat untuk menjamin mutu dan relevansi pendidikan dan tata kelola, akuntabilitas, dan citra pendidikan;
 6. peningkatan peran masyarakat serta dunia usaha dan industri dalam memajukan pendidikan;
 7. pengembangan perpustakaan publik;
 8. pengembangan peran perguruan tinggi dalam peningkatan *lifeskill* masyarakat;
 9. pengembangan perguruan tinggi yang unggul dan berdayasaing internasional.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui ;
 1. perluasan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat;

2. gerakan hidup sehat;
 3. pengendalian ancaman wabah penyakit menular dan endemik;
 4. pengendalian potensi keracunan makanan, gizi buruk, dan anemia bumil;
 5. peningkatan peran masyarakat serta dunia usaha dan industri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 6. pengembangan layanan kesehatan yang unggul dan berdayasaing internasional.
 7. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
 8. Pembangunan Puskesmas di setiap kelurahan
 9. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin.
- c. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi kepemudaan ditingkat provinsi/nasional, melalui :
1. pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kota dan kecamatan;
 2. pengembangan *lifeskill* pemuda dalam wirausaha kreatif;
 3. pembinaan dan pencapaian prestasi pemuda pelopor.
- d. Pembinaan kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, melalui :
1. pembinaan dan apresiasi siswa yang memiliki talenta dan prestasi cabang olahraga tertentu;
 2. pengembangan “olahraga rekreasi” di setiap wilayah kecamatan dan skala kota;
 3. penyelenggaraan event olahraga prestasi tertentu untuk promosi wisata kota;
 4. peningkatan peran masyarakat serta dunia usaha dan industri dalam memajukan olahraga.

- e. Peningkatan kesetaraan jender dalam pembangunan, melalui :
1. peningkatan kapasitas organisasi pemberdayaan perempuan dalam kesetaraan jender, gerakan hidup sehat, dan kesejahteraan keluarga;
 2. pengembangan *lifeskill* wirausaha kreatif bagi kelompok ibu rumah tangga disetiap kecamatan;
 3. pengendalian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kasus *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial, melalui :
1. perluasan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial kemasyarakatan, termasuk perlakuan terhadap kelompok "*diffable*" dan kelompok manula;
 2. penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 3. pengendalian ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan penyebarluasan narkoba, HIV/AIDS, minuman keras, perjudian, praktik asusila, dan penyakit sosial lainnya;
 4. peningkatan peran masyarakat serta dunia usaha dan industri dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- g. Pengembangan budaya lokal Kota Bekasi sebagai fungsi sosial, normatif, dan fungsi ekonomi, melalui :
1. pengembangan budaya sebagai fungsi sosial untuk membangun identitas dan solidaritas sosial kedaerahan;
 2. pengembangan budaya sebagai fungsi normatif untuk melestarikan jati diri dan nilai-nilai religius dan patriotik;
 3. peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya daerah secara adaptif,

sebagai fungsi ekonomi, untuk membangun profil wisata kota.

- h. Peningkatan fungsi kehidupan beragama dalam memelihara akhlak mulia, harmoni sosial, dan perilaku ihsan, melalui :
 - 1. pengembangan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama;
 - 2. pengembangan keteladanan masyarakat yang berbudi pekerti luhur, berakhlak baik dan terpuji, dan berperilaku cerdas, kreatif dan produktif.
- i. Pengendalian potensi kerawanan sosial dan keamanan wilayah, melalui :
 - 1. penguatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat tingkat RT untuk mengendalikan potensi kerawanan sosial dan keamanan wilayah, berkoordinasi dengan RW, Kelurahan, dan Kecamatan, serta bekerjasama dengan pos polisi terdekat menjadi “Lingkungan Ihsan dan Aman”;
 - 2. penguatan ekonomi masyarakat, melalui koperasi dan kegiatan produksi tingkat RT, bagi pemuda, penganggur, dan ibu rumah tangga;
 - 3. internalisasi nilai, sikap, dan perilaku “kreatif dan ihsan”.
- j. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, melalui :
 - 1. pengendalian demografi dan persoalan kependudukan, serta layanan keluarga berencana;
 - 2. pengendalian LPP $\leq 3\%$ per tahun;
 - 3. pencapaian IPM Kota Bekasi = 78,96 pada tahun 2025.

5.1.3 Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa dan Perdagangan yang Berdayasaing

- a. Pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro berbasis pengetahuan dan kreativitas melalui;
 - 1. penggalian potensi industri kreatif;
 - 2. sosialisasi secara meluas tentang ruang lingkup “industri kreatif” kepada masyarakat;
 - 3. pengembangan komunitas UMKM & koperasi (wirausaha) “industri kreatif”; (*“one community, one product”*)
 - 4. pembangunan “Galeri Produk/Jasa Kreatif”; (Creativity Center”)
 - 5. fasilitasi manajemen dan skema kredit bagi pengembangan produksi dan pemasaran UMKM untuk memperkuat daya saing usaha produk unggulan daerah.
 - 6. pembentukan wirausaha baru;
 - 7. pendayagunaan “*Corporate Sosial Responsibility*” untuk pengembangan dan perluasan wirausaha “industri kreatif”.
- b. Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing usaha pembuatan boneka, konveksi, *furniture*, *handycraft*, makanan dan minuman, ikan hias, sepatu dan sandal, dan tanaman hias melalui;
 - 1. fasilitasi IPTEK bagi pengembangan produksi dan pemasaran UMKM untuk memperkuat daya saing usaha produk unggulan daerah.
- c. Peningkatan investasi pelaku usaha swasta terutama pada 4 (empat) sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa;
 - 1. regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif;

2. pengembangan landmark kota sebagai pusat jasa dan perdagangan, berbasis “industri kreatif”;
 3. pengembangan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung ikon kota sebagai pusat jasa dan perdagangan berbasis “industri kreatif”.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam, potensi usaha, dan aset yang dimiliki daerah, melalui :
1. pengembangan pusat riset dan teknologi di bidang persampahan;
 2. peningkatan kinerja badan usaha daerah yang akuntabel, efisien, dan produktif.
- e. Peningkatan produk domestik regional bruto untuk menjamin pertambahan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang positif terhadap perekonomian nasional melalui :
1. penetapan UMK yang adil dan layak bagi kesejahteraan buruh, serta tetap memperhatikan keberlanjutan dan pengembangan usaha;
 2. penempatan pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang tertata dipusat pertumbuhan kota dan pusat pembelanjaan, untuk menjamin perluasan kesempatan usaha;
 3. optimalisasi penempatan kerja pada perusahaan yang beroperasi di Kota Bekasi, untuk menjamin perluasan kesempatan bekerja bagi warga Kota Bekasi;
 4. laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi harus mampu dipacu pada kisaran 6-9 % pertahun.

5.1.4. Mewujudkan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Publik yang Proporsional

- a. Pelaksanaan sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan kota/ kabupaten dan provinsi lain, melalui :
 - 1. pengembangan manajemen lalu lintas;
 - 2. pengembangan MRT;
 - 3. pengembangan terminal regional dan sub terminal;
 - 4. pengembangan sistem transportasi antar moda;
 - 5. pengembangan gedung sistem parkir terpadu.

- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kota yang menjamin kenyamanan berkendara dan kelancaran lalu lintas, melalui :
 - 1. pengembangan aksesibilitas baru antisipasi hambatan perlintasan sebidang jalan rel dan antar wilayah kota;
 - 2. penataan sistem pemeliharaan jalan periodik dan rutin;
 - 3. pengembangan jalur pejalan kaki (*pedestrian*) yang nyaman, aman, dan terhubung seluruh wilayah;

- c. Terpenuhinya prasarana dan sarana umum (PSU) yang aman dan nyaman, melalui :
 - 1. aksesibilitas pada gedung/sarana publik;
 - 2. regulasi standarisasi keamanan, keselamatan, ramah lingkungan, dan kelengkapan bangunan.
 - 3. Tersedianya sarana penerangan jalan umum (PJU)

- d. Pemenuhan alokasi peruntukkan ruang terbuka hijau, melalui :
 - 1. pengaturan penyediaan ruang terbuka hijau bagi pengembang kawasan;
 - 2. pengendalian dan penertiban jalur hijau;

3. pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap alih fungsi RTH, berkomitmen untuk pencapaian RTH 17,5 %;
 4. pembangunan taman “tematis” skala kota;
 5. penguatan peran masyarakat serta dunia usaha dan industri dalam penyediaan dan pengelolaan taman;
 6. pengembangan model taman publik sebagai pembatas bangunan tanpa pagar pembatas tetap di wilayah pusat kota (*kawasan borderless*).
- e. Peningkatan kapasitas pelayanan kebutuhan air bersih, melalui :
1. peningkatan kapasitas IPA dan pendistribusiannya;
 2. pengembangan kelembagaan dan perluasan layanan PDAM Tirta Patriot;
 3. pengembangan peran swasta dalam penyediaan air bersih;
- f. Pengendalian sistem drainase dan pengendalian bencana banjir, melalui :
1. pengendalian berkembangnya permukiman tidak terstruktur (tanpa sistem drainase) di sekitar permukiman terstruktur;
 2. pemeliharaan periodik saluran sekunder;
 3. revitalisasi situ-situ sebagai area tampungan air;
 4. pembangunan jalur drainase makro terkoneksi ke kanal banjir;
 5. penerapan kebijakan perijinan pemanfaatan lahan dengan penyediaan “on site detention”;
 6. rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung;
 7. gerakan masyarakat “tidak membuang sampah ke saluran/kali”.

- g. Pengelolaan dan penataan pembangunan pemukiman, melalui :
 - 1. optimalisasi pengembangan model rusunawa yang dibangun pemerintah dan masyarakat sebagai konsep penataan kawasan kumuh;
 - 2. pengembangan sistem hunian vertikal;
 - 3. pengembangan kawasan siap bangun.
- h. Pengelolaan sarana perdagangan yang teratur, melalui :
 - 1. pengembangan model pasar tradisional yang modern;
 - 2. penataan kawasan pusat kota sebagai area perdagangan dan jasa modern, kreatif, dan menjadi *landmark* kota;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga skala kota dan kecamatan, melalui :
 - 1. pengembangan sarana olah raga skala kota bertaraf nasional, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dibangun oleh masyarakat.
- j. Pengelolaan sistem persampahan dan kebersihan kota, melalui :
 - 1. pengembangan industri pengolahan sampah modern dan menjadi sumber energi;
 - 2. pembangunan TPS tertutup sebagai depo pengolahan energi alternatif;
 - 3. pengembangan "*septic tank*" komunal.
- k. Pemenuhan kebutuhan energi, melalui :
 - 1. penggalian potensi sumber energi;
 - 2. diversifikasi energi;
 - 3. penambahan jaringan listrik.

5.1.5 Mewujudkan Lingkungan yang Nyaman

- a. Pengendalian potensi dan dampak lingkungan hidup, melalui :
 - 1. regulasi konservasi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran;
 - 2. pengendalian pencemaran limbah industri dan rumah tangga;
 - 3. pengendalian tingkat pencemaran udara; (*"car free day"*)
 - 4. pengembangan *"clean and eco-development"*.
- b. Pengendalian penggunaan air tanah, melalui :
 - 1. pengaturan dan penertiban penggunaan air tanah;
- c. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan, melalui
 - 1. Pembentukan komunitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 - 2. Penerapan sistem pengelolaan sampah dengan pola 3 R yang lebih luas
 - 3. Terselenggaranya pembangunan sarana sanitasi yang berbasis komunitas
 - 4. Perbaikan kawasan kumuh yang diakibatkan rendahnya ketersediaan infrastruktur penunjang lingkungan
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat atas potensi bencana alam, melalui :
 - 1. sosialisasi potensi bencana banjir, penyediaan perlengkapan penanganan dampak bencana, dan prosedur evakuasinya.

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan arah pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas. Tahapan menggambarkan periodisasi waktu pelaksanaan pembangunan 5 (lima)

tahunan, berdasarkan tahapan pelaksanaannya maka RPJP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 meliputi 4 (empat) tahapan, yakni :

❧ **Pembangunan Jangka Menengah ke-1 (2005-2009)**

Landasan pembentukan atmosfer Perekonomian Kota Bekasi yang berbasis Jasa dan Perdagangan dengan mempersiapkan SDM yang cerdas dan sehat.

❧ **Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2009-2013)**

Upaya mempersiapkan SDM Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat dan berkompeten serta berperilaku kreatif

❧ **Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (2013-2018)**

Aktualisasi kemampuan SDM masyarakat Kota Bekasi yang membentuk daya saing perekonomian daerah yang maju dan pencitraan Publik atas profil Bekasi Kota Kreatif yang Ikhsan

❧ **Pembangunan Jangka Menengah ke-4 (2018-2023)**

Perwujudan struktur perekonomian Kota yang semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga di masa yang akan datang

❧ **Pembangunan Jangka Menengah Transisional (2023-2025)**

Mewujudkan kondisi **Creative Society** yang mampu melakukan rekayasa secara mandiri dalam pemecahan permasalahan sosial, tanggap terhadap perkembangan ekonomi global dan tangguh terhadap permasalahan dari internal dan eksternal. Kelanjutan Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi.

Skala prioritas menggambarkan pekerjaan dan pencapaian yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas dimaksud adalah sebagai berikut :

Tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah ke-1 : Tahun 2005-2009

Tahapan ini pada hakikatnya telah dilalui oleh masa bakti Kepala Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2003-2008 (Renstra Kota Bekasi Tahun 2003-2008) dan sebagian (1 tahun) masa bakti Kepala Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2008-2013 (RPJM Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013). Tahapan ini pada dasarnya merupakan **landasan dalam membentuk atmosfir perekonomian** Kota Bekasi yang berbasis jasa dan perdagangan (Tahun 2003-2008) dan **landasan untuk mempersiapkan sumber daya manusia** yang cerdas dan sehat, melalui terobosan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis (Tahun 2008-2013), sebagai bentuk perluasan akses pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar.

Tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah ke-2 : Tahun 2009-2013

Tahapan ini (5 tahun) dijalani oleh masa bakti Kepala Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2008-2013 (RPJM Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013).

Tahapan ini pada dasarnya merupakan **lanjutan dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia** yang cerdas dan sehat, perluasan akses pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai pada jenjang menengah. Pekerjaan lainnya yang penting dan relevan pada tahapan ini adalah mengarahkan sektor pendidikan untuk **merumuskan model yang tepat dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku kreatif di lingkungan sekolah** dan pendekatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan perilaku kreatif terhadap siswanya. Lembaga kursus tertentu diarahkan untuk memberikan **bekal kompetensi yang relevan** dengan kebutuhan pengembangan potensi usaha perdagangan/jasa kreatif. Sosialisasi bentuk kegiatan usaha berbasis kreatif mulai dikembangkan di kalangan pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi. Pemahaman dan kesadaran masyarakat ditumbuhkan

bahwa prinsip perekonomian **knowledge based economy** yang sejalan dengan era globalisasi, juga relevan dengan kepentingan Kota Bekasi untuk mempromosikan kegiatan usaha berbasis kreatif. Norma kehidupan sosial, ekonomi, dan tata laksana pemerintahan dibangun dengan nilai, sikap, dan perilaku ihsan. Secara umum tahapan ini merupakan **tahapan internalisasi** nilai, sikap, dan perilaku kreatif dan ihsan, berlaku sebagai fondasi dan instrumen dalam membentuk “Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan”.

Tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah ke-3 : Tahun 2013-2018

Tahapan ini (5 tahun) akan dijalani oleh masa bakti Kepala Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2013-2018 (RPJM Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018).

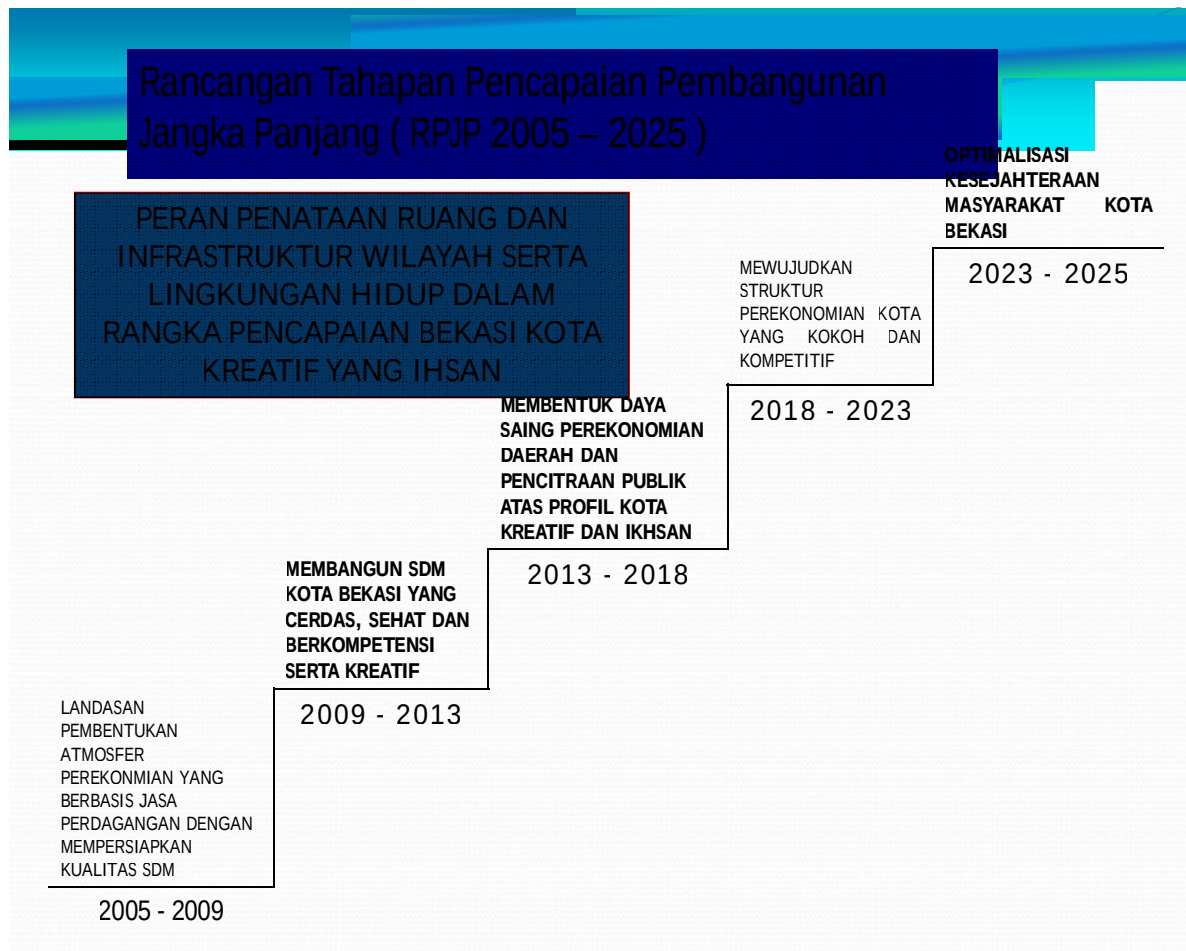
Tahapan ini pada dasarnya merupakan **tahapan aktualisasi** nilai, sikap, dan perilaku kreatif dan ihsan, **pembentukan daya saing** perekonomian daerah, infrastruktur kota yang maju dan **pencitraan publik** atas profil “Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan”. Pemerintah dan kelembagaan sosial masyarakat memberikan apresiasi terhadap nilai, sikap, dan perilaku kreatif dan ihsan yang telah ditampilkan kinerja aparatur, pelaku usaha, maupun warga kota, untuk membentuk pola perilaku dan keteladanan kepada masyarakat.

Tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah ke-4 : Tahun 2018 -2023

Tahapan ini (5 tahun) akan dijalani oleh masa bakti Kepala Daerah Kota Bekasi Periode Tahun 2018-2023 (RPJM Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023). Tahapan ini merupakan tahapan memperkuat struktur perekonomian Kota yang semakin kokoh dan kompetitif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian.

Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisional (2023 – 2025)

Tahapan ini pada dasarnya merupakan **tahapan refleksi kehidupan “creative society”** yang mampu melakukan rekayasa secara mandiri dalam memecahkan persoalan sosial yang dihadapi dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan ekonomi global, serta tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan dengan nilai, sikap, dan perilaku ihsan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.



BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kota Bekasi, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bekasi
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) di Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJP Kota Bekasi Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah

Kota Bekasi Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi dengan didukung oleh Instansi Vertikal Pemerintah Daerah Kota Bekasi, pihak legislatif, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;

2. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Bekasi 2005 – 2025;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bekasi untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan;
5. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bekasi. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kota Bekasi, tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintah daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi.

Untuk itu RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 ini perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Bekasi, 26 Juni 2013



LAMPIRAN

Tabel Jumlah Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Bekasi

Kecamatan	Jumlah Eksisting (2008)			Jumlah Kebutuhan (2025)			Jumlah Kekurangan		
	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	RS	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Pondokgede	1	3	1	1	3	10	0	0	9
Jati Sampurna	2	1	3	2	1	4	0	0	1
Pondok Melati	1	2	0	1	2	8	0	0	8
Jati Asih	1	2	1	1	2	4	0	0	3
Bantar Gebang	1	1	2	1	3	11	0	2	9
Mustika Jaya	0	1	3	1	2	9	1	1	6
Bekasi Timur	10	4	2	10	4	9	0	0	7
Rawa Lumbu	3	3	3	3	3	12	0	0	9
Bekasi Selatan	5	4	2	5	4	8	0	0	6
Bekasi Barat	0	5	1	1	5	14	1	0	13
Medan Satria	1	1	4	1	1	6	0	0	2
Bekasi Utara	4	4	2	4	4	6	0	0	4
TOTAL	29	31	24	31	34	101	2	3	77

Sumber : Hasil Rencana, 2009

Tabel Jumlah Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bekasi

Kecamatan	Jumlah Eksisting (2008)			Jumlah Kebutuhan (2025)			Jumlah Kekurangan		
	SD	SLTP	SMU	SD	SLTP	SMU	SD	SLTP	SMU
Pondokgede	80	37	27	125	37	27	45	0	0
Jati Sampurna	32	8	5	51	9	5	19	1	0
Pondok Melati	26	4	2	99	17	8	73	13	6
Jati Asih	78	29	16	78	29	16	0	0	0
Bantar Gebang	31	11	5	135	22	11	104	11	6
Mustika Jaya	25	10	7	112	19	9	87	9	2
Bekasi Timur	101	35	22	113	35	22	12	0	0
Rawa Lumbu	64	19	12	144	24	12	80	5	0
Bekasi Selatan	82	23	17	93	23	17	11	0	0
Bekasi Barat	86	22	15	172	29	15	86	7	0
Medan Satria	60	21	11	68	21	11	8	0	0
Bekasi	96	34	20	96	34	20	0	0	0

Kecamatan	Jumlah Eksisting (2008)			Jumlah Kebutuhan (2025)			Jumlah Kekurangan		
	SD	SLTP	SMU	SD	SLTP	SMU	SD	SLTP	SMU
Utara									
TOTAL	761	253	159	1.286	299	173	525	46	14

Sumber: Hasil Rencana, 2009

**Tabel Proyeksi Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi
Kota Bekasi, 2010-2025 (Jutaan Rp, harga konstan 2000)**

No	Lapangan Usaha	PDRB 2005	Laju Rata2	Perkiraan				Proporsi %
				2010	2015	2020	2025	
1	Pertanian	126,235	2.54	143,102	162,223	183,899	208,471	0.6
2	Pertambangan & Penggalian							
3	Industri Pengolahan	5,478,623	5.8	7,262,728	9,627,823	12,763,108	16,919,393	48.9
4	Listrik, Gas, Air Bersih	398,020	5.76	526,638	696,818	921,991	1,219,927	3.5
5	Bangunan	407,545	5.58	534,566	701,177	919,716	1,206,368	3.5
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	3,239,089	5.76	4,285,782	5,670,708	7,503,165	9,927,770	28.7
7	Pengangkutan & Komunikasi	927,607	7.05	1,304,059	1,833,288	2,577,295	3,623,243	10.5
8	Kuangan, Persewaan, Jasa	403,359	5.47	526,375	686,908	896,401	1,169,785	3.4
9	Jasa-jasa	760,008	6.1	1,021,917	1,374,083	1,847,610	2,484,321	7.2
	Jumlah*			15,605,167	20,755,044	27,613,184	36,759,277	102.2
	Bekasi**	11,739,946	5.76	15,533,643	20,553,251	27,194,917	35,982,799	
	Penduduk			2,307,132	2,659,481	3,066,291	3,534,618	
	PDRB/Kapita (Rp.)			6,763,881	7,804,171	9,005,402	10,399,788	
	PDRB/Kapita			752	867	1,001	1,156	

	(US\$)**							
--	----------	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel Proyeksi Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Bekasi, 2008 -2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	REALISASI	PROYEKSI
1	Indeks Pembangunan Manusia	POIN	2008	75,73	
			2009	76,1	
			2010	76,36	
			2011	76, 68	
			2015		77.16
			2020		78.06
			2025		78.96
			2030		79.86



**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2005 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 – 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat dan Dunia Usaha.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RJPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD atau Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJPD KOTA BEKASI TAHUN 2005 – 2025

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah tahun 2005–2025 adalah rencana 20 (duapuluh) tahun yang menggambarkan visi, misi daerah yang dijabarkan ke dalam arahan pembangunan.
- (2) RPJP Daerah memuat tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2005 – 2025

Pasal 3

Sistematika Penyusunan RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai Berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH.

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.

BAB IV : VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 – 2025.

BAB V : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN.

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Juni 2013



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 10

2013

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
TAHUN 2005 – 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan Daerah), Masyarakat dan Dunia Usaha.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RJPMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD atau Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJPD KOTA BEKASI TAHUN 2005 – 2025

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah tahun 2005–2025 adalah rencana 20 (duapuluh) tahun yang menggambarkan visi, misi daerah yang dijabarkan ke dalam arahan pembangunan.
- (2) RPJP Daerah memuat tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2005 – 2025

Pasal 3

Sistematika Penyusunan RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai Berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	: VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 – 2025
BAB V	: ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
BAB VI	: KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2005–2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Juni 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 26 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 10 SERI E